

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil media Kompas.com dan Tempo.co

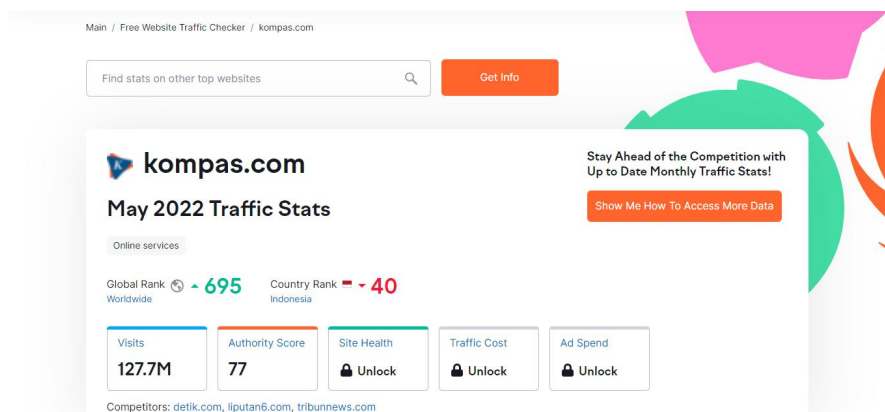
1. Profil Media Kompas.com

Kompas.com merupakan bagian dari grup media Kompas yang pertama kali hadir di internet Indonesia sejak tahun 1995. Kompas.com merupakan salah satu pionir portal berita *Online* di Indonesia. Pada awalnya, Kompas.com berdiri dengan nama Kompas *Online* atau KOL yang dapat diakses melalui alamat kompas.co.id. Pada saat itu, portal berita Kompas *Online* hanya menampilkan replika dari berita-berita yang terbit di harian Kompas pada hari yang sama.

Tujuan awal dari berdirinya Kompas *Online* adalah untuk menjangkau pangsa pasar yang tidak dapat dijangkau oleh jalur distribusi harian Kompas. Sehingga semua orang dapat menikmati sajian dari harian Kompas dari mana saja pada hari itu juga. Portal media Kompas *Online* selanjutnya berubah menjadi Kompas.com sejak tahun 2008 hingga saat ini. Nilai utama yang dianut oleh Kompas.com adalah “Jernih Melihat Dunia”, seperti yang dikutip dari laman resmi portal Kompas.com. Hal tersebut menunjukkan jika media Kompas.com selalu berusaha untuk menyajikan berita yang berimbang, tidak berat sebelah dan sebisa mungkin netral tanpa memihak siapapun.

Melalui keterangan yang ditampilkan dalam laman resmi Kompas.com, kita dapat melihat jika Kompas.com adalah portal berita *online* yang selalu berusaha untuk menyajikan berita yang sesuai seperti apa yang sesungguhnya terjadi. Fokus utama dari pemberitaan Kompas.com adalah untuk menyampaikan peristiwa sebagaimana aslinya.

Selanjutnya portal berita Kompas.com terus mengalami perkembangan hingga menjadi seperti saat ini. Mengutip laman Semrush.com, Kompas.com memiliki sekitar 127,7 juta *views* selama bulan Mei 2022, menempati urutan ke 40 laman dengan *traffic* terbanyak di Indonesia.

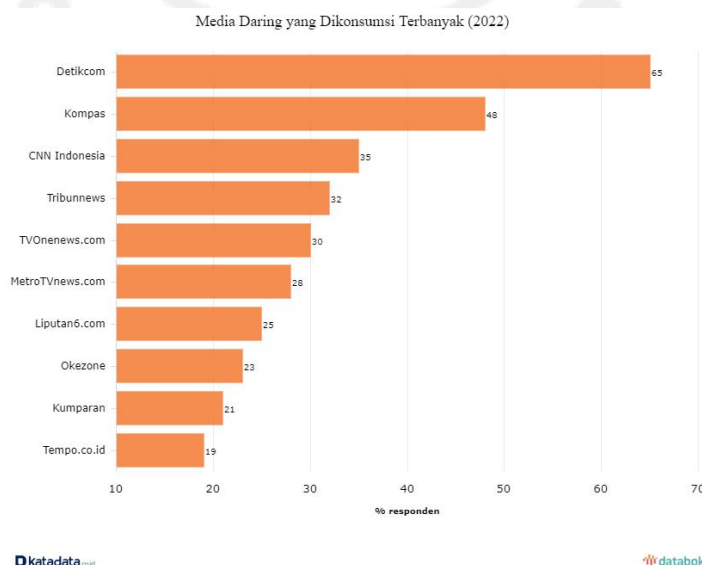


Gambar 4.1. Data kunjungan laman Kompas.com Mei 2022 menurut Semrush.com

<https://www.semrush.com/website/kompas.com/overview>

Jumlah kunjungan portal berita Kompas.com sebanyak 127,7 juta dalam waktu 1 bulan merupakan jumlah yang cukup besar. Jumlah kunjungan memang tidak menunjukkan berapa banyak orang yang benar-benar melihat Kompas.com, meski begitu, hal tersebut menunjukkan jika Kompas.com merupakan portal berita *online* yang sangat berpengaruh di Indonesia.

Selain itu, mengutip data yang disajikan oleh laman katadata.co.id, Kompas.com menempati posisi kedua sebagai portal berita yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.



Gambar 4.2. Data Media Daring yang Paling Sering Dikonsumsi Masyarakat Indonesia pada Tahun 2022 Menurut Katadata.co.id

Dua data yang disajikan, baik dari Semrush.com maupun hasil penelitian yang disajikan di Katadata.co.id menunjukkan jika Kompas.com merupakan media yang cukup berpengaruh bagi masyarakat Indonesia.

2. Profil Media Tempo.co

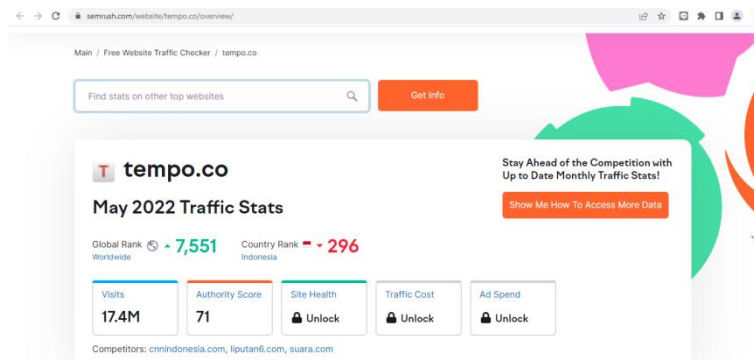
Tempo.co merupakan bagian dari grup media Tempo. Grup media Tempo sendiri pertama kali berdiri sejak tahun 1971. Sejak awal berdirinya Tempo, grup media ini sudah langsung menyoroti kejadian yang bersinggungan dengan pemerintahan. Majalah pertama yang terbit pada Februari 1971 menyoroti tentang tragedi Minarni dan juga peristiwa kongres PBSI.

Media Tempo pernah mengalami pemberedelan sebanyak 2 kali selama masa Orde Baru. Pemberedelan pertama terjadi pada 1982 karena Tempo dianggap terlalu keras dalam mengkritik rezim orde baru serta partai Golkar yang merupakan kendaraan politik pada masa itu. Pemberedelan kedua terjadi pada tahun 1994 ketika Tempo dianggap terlalu keras mengkritik pemerintahan Soeharto dan Habibie berkaitan dengan pembelian kapal bekas dari Jerman Timur. Sejarah grup media Tempo sudah menunjukkan jika media Tempo merupakan media yang cukup sering bertentangan dengan pemerintahan.

Dalam laman “Tentang Kami” Tempo.co ingin mengatakan jika mereka adalah salah satu portal berita yang dapat dipercaya di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kata-kata pembuka dalam laman tersebut. Tempo.co menulis kata-kata seperti: “banyak portal berita di Indonesia, tapi mana yang bisa dipercaya?” Selanjutnya, Tempo.co menyatakan jika mereka hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Menjadi portal berita yang enak dibaca dan dapat dipercaya.

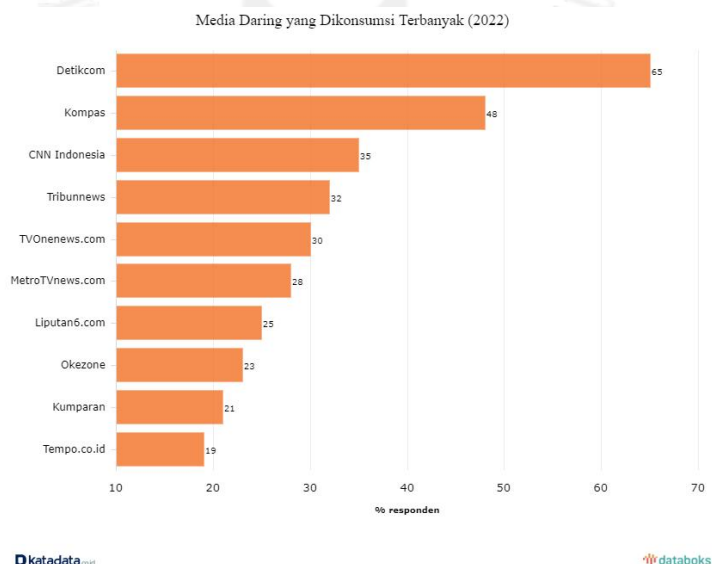
Sekalipun jumlah *traffic* Tempo.co jauh dari Kompas.com, yaitu hanya sekitar 17,4 juta *views* selama Mei 2022, akan tetapi portal berita Tempo.co tetap merupakan portal berita *online* berskala nasional yang berpengaruh di masyarakat.

Jumlah kunjungan sebesar 17,4 juta dalam waktu sebulan juga tidak bisa dikatakan sedikit.



Gambar 4.3. Data kunjungan laman Tempo.co Mei 2022 menurut Semrush.com
<https://www.semrush.com/website/tempo.co/overview/>

Selain itu, portal berita Tempo.co masih masuk dalam 10 besar portal berita *online* yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2022, seperti yang disajikan oleh Katadata.co.id. Portal berita *online* Tempo.co menempati urutan kesepuluh sebagai media *online* yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.



Gambar 4.4. Data Media Daring yang Paling Sering Dikonsumsi Masyarakat Indonesia pada Tahun 2022 Menurut Katadata.co.id

B. Perkembangan Energi Baru Terbarukan di Indonesia

Indonesia sudah mulai mencanangkan target bauran energi baru terbarukan. Target dalam jangka pendek adalah bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Setelah itu, target besar dan ambisius selanjutnya adalah Indonesia bebas emisi karbon pada tahun 2060 yang artinya 100% energi yang digunakan sudah beralih dari energi fosil kepada energi baru terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan.

Meski begitu, bauran energi baru terbarukan di Indonesia masih sangat rendah. Hingga tahun 2021 saja, bauran energi baru terbarukan di Indonesia baru mencapai angka 11,5% (sumber: ebtke.esdm.go.id). Sedangkan untuk tahun 2022, pemerintah menargetkan adanya kenaikan bauran energi baru terbarukan sebagai sumber energi primer hingga mencapai angka 15,7%.

Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor energi baru terbarukan. Mulai dari sumber energi panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, tenaga air dan masih banyak sumber energi lainnya. Hanya saja ketergantungan terhadap energi fosil, baik karena alasan ekonomi maupun politik masih sangat besar. Tapi sudah saatnya bagi Indonesia untuk beralih dari energi fosil yang sulit diperbaharui menuju energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Marquardt (2014) mengatakan jika ada 3 tahap dalam proses manajemen transisi, terkhusus manajemen transisi energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Tahap pertama adalah tahap eksperimen. Tahap eksperimen bertujuan untuk mencoba dalam skala kecil pengembangan energi baru terbarukan. Kedua adalah tahap akselerasi. Setelah penelitian dirasa sudah cukup, maka pemerintah dapat melakukan akselerasi untuk energi baru terbarukan. Akselerasi berarti mempercepat penggunaan energi baru terbarukan di banyak daerah di Indonesia. Terakhir adalah tahap stabilisasi. Tahap stabilisasi adalah suatu fase di mana energi baru terbarukan mulai dimanfaatkan di Indonesia. Tahap stabilisasi bertujuan untuk menormalkan penggunaan energi baru terbarukan sehingga tidak ada kendala dalam proses transisi yang sudah berjalan.

Melalui informasi yang tersedia oleh pemerintah maupun media-media nasional di Indonesia, kita dapat memahami jika saat ini, proses transisi energi di

Indonesia masih dalam tahapan eksperimen. Alasannya karena sebagian besar energi yang digunakan di Indonesia masih berasal dari energi fosil. Penggunaan energi baru terbarukan masih terbatas di daerah-daerah tertentu dan belum diaplikasikan secara nasional. Meski begitu, melalui program-program pemerintah, bauran EBT akan terus ditingkatkan.

Indonesia sendiri memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat melimpah. Mulai dari energi surya, energi hidro, energi bayu, bioenergi, panas bumi hingga laut (sumber: den.go.id). Total potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 441,7 GW. Sedangkan menurut Erdiwansyah (2021), hingga tahun 2019, Indonesia baru memanfaatkan 2% dari keseluruhan potensi tersebut.

C. Sajian Data Penelitian

Analisis Framing akan dilakukan menggunakan teknik analisis Robert N. Entman. Teknik analisis *framing* Robert N. Entman memiliki 4 elemen, yaitu *define problem, diagnose causes, make moral judgement, treatment recommendation*. Keempat elemen tersebut akan digunakan untuk memahami *framing* yang digunakan oleh media Kompas.com dan Tempo.co terkait pemberitaan tentang isu energi terbarukan di Indonesia sepanjang tahun 2021.

1. Analisis Pemberitaan Isu Energi Baru Terbarukan pada Portal Berita Kompas.com

a. **Judul Berita:** Pemerintah Targetkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan hingga 23 Persen pada 2025

Terbit: 1 Februari 2021

Tabel 4.1

Analisis Framing Model Robert N. Entman “Pemerintah Targetkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan hingga 23 Persen pada 2025”

<i>Define Problem</i>	Masalah Managerial (Pengelolaan oleh Pemerintah)
<i>Diagnose Causes</i>	1) Potensi energi terbarukan belum dikelola secara

	maksimal. 2) Ketergantungan Indonesia terhadap energi impor dari luar negeri.
<i>Make Moral Judgement</i>	Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar, tapi sedikit dimanfaatkan.
<i>Treatment Recommendation</i>	1) Meningkatkan riset dan inovasi dalam industri energi. 2) Mengganti energi fosil dengan energi terbarukan yang tersedia secara lokal.

1) *Define Problem*

Permasalahan yang diangkat pada berita “Pemerintah Targetkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan hingga 23 Persen pada 2025” yang tayang di Kompas.com pada 1 Februari 2021 adalah masalah managerial. Masalah tersebut sesuai dengan apa yang ditulis dalam berita, yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya potensi EBT di Indonesia cukup besar, terutama dari energi surya, angin, dan hidroelektrik. Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, tentu memiliki potensi energi surya berlimpah, namun belum dikelola secara maksimal.”

Kompas.com menyoroti pernyataan dari Ma’ruf Amin tentang kurangnya pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Kompas.com melihat masalah yang ada dari sisi kurangnya pengelolaan. Kata-kata “namun belum dikelola secara maksimal” menunjukkan jika ada permasalahan dalam ranah managerial terkait perkembangan energi terbarukan. Kurangnya investasi, riset dan inovasi di Indonesia terhadap pengembangan energi terbarukan juga menunjukkan bagaimana kurangnya pengelolaan dan manajemen energi terbarukan di Indonesia. Kalimat yang mendukung hal tersebut adalah:

“Sebenarnya potensi EBT di Indonesia cukup besar, terutama dari energi surya, angin, dan hidroelektrik. Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, tentu memiliki potensi energi surya berlimpah, namun belum dikelola secara maksimal, kata dia. Hal tersebut, kata dia, terlihat dari penggunaan energi surya, energi angin, dan hidroelektrik yang belum banyak dimanfaatkan sektor industri atau perumahan.”

Ma'ruf Amin sebenarnya berkata jika ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai berubah kepada energi terbarukan seperti dalam tulisan:

“Ketergantungan terhadap energi fosil itu harus secara bertahap diganti dengan energi yang bersumber dari energi terbarukan yang tersedia secara lokal.”

Namun Kompas.com tidak berfokus kepada prioritas pemerintah, yaitu perubahan dari energi fosil menuju energi terbarukan. Kompas.com membingkai jika Indonesia merupakan negara yang masih bergantung kepada energi fosil. Seperti apa yang tertulis dalam berita sebagai berikut:

“Pasalnya, Indonesia saat ini masih tergantung pada energi fosil yang diimpor.”

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang diimpor dari negara lain, mengisyaratkan terhambatnya pengembangan Energi Baru Terbarukan dalam negeri yang menyebabkan Indonesia masih perlu untuk mengimpor energi dari negara lain.

Kompas.com tidak berfokus kepada solusi untuk perkembangan energi terbarukan, melainkan Kompas.com lebih fokus kepada hambatan perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Keseluruhan keterangan yang diangkat menunjukkan jika peristiwa yang diangkat di dalam berita ini dilihat sebagai masalah managerial.

2) *Diagnose Causes*

Kurangnya pengelolaan energi terbarukan di Indonesia serta ketergantungan Indonesia terhadap energi yang diimpor dari luar negeri diposisikan sebagai penyebab utama terhambatnya perkembangan Energi Baru Terbarukan di Indonesia.

Kurangnya pengelolaan energi terbarukan di Indonesia menjadi penyebab terhambatnya perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah kutipan pernyataan Ma'ruf Amin yang ditulis oleh Kompas.com, seperti sebagai berikut:

“Sebenarnya potensi EBT di Indonesia cukup besar, terutama dari energi surya, angin, dan hidroelektrik. Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, tentu memiliki potensi energi surya berlimpah, namun belum dikelola secara maksimal.”

Selain itu, Kompas.com juga menuliskan jika energi terbarukan belum banyak dimanfaatkan baik oleh industri maupun oleh rumah tangga. Hal tersebut seperti yang ditulis oleh Kompas.com sebagai berikut:

“Hal tersebut, kata dia, terlihat dari penggunaan energi surya, energi angin, dan hidroelektrik yang belum banyak dimanfaatkan sektor industri atau perumahan.”

Dua bagian tulisan tersebut menunjukkan bagaimana Kompas.com membingkai kurangnya pengelolaan energi terbarukan di Indonesia sebagai salah satu penghambat perkembangan energi baru terbarukan.

Meski begitu, dalam berita ini, terhambatnya perkembangan energi terbarukan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Faktor lain yang dibingkai sebagai penyebab dari terhambatnya perkembangan energi terbarukan adalah ketergantungan Indonesia terhadap energi yang diimpor dari luar negeri. Kompas.com menuliskan hal seperti berikut:

“Ma'ruf mencontohkan, saat ini sumber energi utama yang digunakan untuk memasak oleh sebagian besar rumah tangga di Indonesia, yakni elpiji, lebih dari 70 persennya diimpor.”

Contoh yang ditulis adalah bagaimana sebagian rumah tangga di Indonesia masih bergantung kepada elpiji yang 70 persennya masih diimpor dari luar negeri. Padahal ada alternatif lain yang bisa dimanfaatkan oleh rumah tangga di Indonesia, misalnya adalah biogas. Kompas.com juga menuliskan bagaimana Ma'ruf Amin mengatakan jika penggunaan energi fosil harus secara bertahap digantikan dengan Energi Baru Terbarukan yang tersedia secara lokal, seperti apa yang ditulis oleh Kompas.com, sebagai berikut:

“Ketergantungan terhadap energi fosil itu harus secara bertahap diganti dengan energi yang bersumber dari energi terbarukan yang tersedia secara lokal.”

Kata-kata “diganti dengan energi yang bersumber dari energi terbarukan yang tersedia secara lokal” mengisyaratkan jika selama ini Indonesia masih bergantung dengan energi impor dari luar negeri dan sudah saatnya untuk beralih ke energi terbarukan yang tersedia secara lokal. Kompas.com juga memperkuat pendapat tersebut dengan menulis seperti berikut:

“Pasalnya, Indonesia saat ini masih tergantung pada energi fosil yang diimpor.”

Tulisan tersebut mengindikasikan bagaimana ketergantungan Indonesia kepada energi impor. Ketergantungan tersebut menyebabkan masyarakat dan mungkin pemerintah enggan untuk berinovasi dan beralih menuju energi terbarukan.

3) ***Make Moral Judgement***

Penilaian moral yang diangkat Kompas.com dalam berita ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin jika energi terbarukan di Indonesia masih belum banyak dimanfaatkan, baik oleh sektor industri maupun sektor perumahan. Tulisan dalam berita yang mendukung adalah sebagai berikut:

“Hal tersebut, kata dia, terlihat dari penggunaan energi surya, energi angin, dan hidroelektrik yang belum banyak dimanfaatkan sektor industri atau perumahan.”

Sebetulnya potensi-potensi energi terbarukan di Indonesia itu sangat besar, hanya saja belum banyak yang memanfaatkannya. Dalam tulisan di atas termuat suatu ironi. Energi terbarukan di Indonesia sangatlah banyak. Tiga contoh yang disebutkan adalah energi surya, energi angin dan energi hidroelektrik. Meski begitu, pemanfaatan dari ketiga energi itu masih sangat kurang. Penilaian moral yang terbentuk menyayangkan mengapa Indonesia masih belum bisa memanfaatkan potensi energi terbarukan yang dimilikinya.

Sebelumnya, Kompas.com menulis kutipan langsung pernyataan Ma’ruf Amin yang dapat menjadi pendukung dari *moral judgement* yang dibingkai oleh Kompas.com seperti berikut:

“Sebenarnya potensi EBT di Indonesia cukup besar, terutama dari energi surya, angin, dan hidroelektrik. Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, tentu memiliki potensi energi surya berlimpah, namun belum dikelola secara maksimal.”

Pernyataan tersebut menunjukkan suatu penilaian moral jika sebetulnya Indonesia sangat mampu untuk mengembangkan energi terbarukan. Hanya saja, kurangnya pengelolaan membuat banyak pihak yang enggan untuk menggunakan energi terbarukan. Hal lain yang disayangkan adalah ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi fosil yang diimpor dari luar negeri. Ketergantungan terhadap energi fosil yang diimpor masih berkaitan dengan kurangnya pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dalam kalimat sebagai berikut:

“Pasalnya, Indonesia saat ini masih tergantung pada energi fosil yang diimpor.”

Kata-kata ketergantungan terhadap energi fosil yang diimpor terus menerus diulang oleh Kompas.com. Hal tersebut menunjukkan bagaimana kurangnya pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia menjadi hal yang cukup disesalkan.

4) *Treatment Recommendation*

Kompas.com mengutip pernyataan jika riset dan inovasi dalam industri energi perlu ditingkatkan agar target bauran energi terbarukan di tahun 2025 dapat tercapai. Bagian dalam berita yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Oleh karena itu, selain investasi dirinya juga ingin menekankan pentingnya riset dan inovasi untuk industri energi Indonesia. “Target bauran energi dengan energi terbarukan pada tahun 2025 tidak akan tercapai jika riset dan inovasi tidak turut serta ditingkatkan,” ucap dia.”

Riset dan inovasi adalah salah satu *treatment recommendation* yang ditulis oleh Kompas.com. Melalui riset dan inovasi, maka target energi terbarukan pada tahun 2025 mungkin untuk dicapai. Meskipun teknik penyampaian Kompas.com dalam bentuk negatif “Target bauran energi dengan energi terbarukan pada tahun

2025 tidak akan tercapai jika riset dan inovasi tidak turut serta ditingkatkan,” akan tetapi, kita dapat mengerti jika riset dan inovasi merupakan salah satu cara yang disarankan agar target bauran energi terbarukan pada tahun 2025 dapat tercapai.

Hal kedua yang menjadi *treatment recommendation* yang ditulis oleh Kompas.com adalah mengganti energi fosil dengan energi terbarukan yang bisa didapat secara lokal. Hal yang ditekankan adalah energi terbarukan yang tersedia secara lokal, sesuai dengan apa yang dikutip oleh Kompas.com sebagai berikut:

“Ketergantungan terhadap energi fosil itu harus secara bertahap diganti dengan energi yang bersumber dari energi terbarukan yang tersedia secara lokal.”

Penekanan Kompas.com tidak hanya pada perubahan dari energi fosil kepada energi terbarukan. Penekanan yang diangkat oleh Kompas.com berada pada energi terbarukan yang tersedia secara lokal. *Treatment recommendation* yang kedua berbicara tentang kemandirian Indonesia sebagai bangsa dan negara. Bukan hanya merubah penggunaan energi fosil menuju energi terbarukan, tapi juga memanfaatkan energi terbarukan yang sudah ada secara lokal. Hal tersebut akan mendorong adanya pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

b. Judul Berita: Menteri ESDM Beberkan Tantangan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Terbit: 8 Maret 2021

Tabel 4.2

Analisis Framing Model Robert N. Entman “Menteri ESDM Beberkan Tantangan Pengembangan Energi Baru Terbarukan”

<i>Define Problem</i>	Masalah Managerial Oleh Pemerintah
<i>Diagnose Causes</i>	1) Turunnya permintaan akibat pandemi Covid-19. 2) Megaprojek pembangkit listrik 35.000 MW yang akan selesai dalam waktu dekat. 3) Kompetisi dengan negara lain untuk menarik

	investor.
<i>Make Moral Judgement</i>	Cadangan energi di Indonesia berlimpah, namun mayoritas bukan dari energi baru terbarukan.
<i>Treatment Recommendation</i>	1) Menyusun strategi untuk meningkatkan porsi Energi Baru Terbarukan. 2) Mengantisipasi dan menjaga agar investor tetap mau masuk ke Indonesia.

1) *Define Problem*

Isu utama yang diangkat dalam berita “Menteri ESDM Beberkan Tantangan Pengembangan Energi Baru Terbarukan”, adalah masalah managerial. Berita ini hendak menunjukkan jika perkembangan energi terbarukan di Indonesia terhambat karena adanya masalah-masalah managerial yang cukup jelas terlihat. Kalimat dalam berita yang mendukung masalah ini adalah:

“Pemerintah mengakui adanya sejumlah tantangan dalam pengembangan bauran energi baru tebarukan (EBT) terhadap energi primer nasional, meskipun potensi energi bersih dalam negeri itu sangat besar.”

Masalah managerial dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia menjadi fokus pembahasan dalam berita ini. Kompas.com ingin membingkai jika sekalipun potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangat besar, akan tetapi tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Tantangan-tantangan yang dihadapi mayoritas seputar permasalahan pengelolaan dan manajemen energi yang kurang tepat di Indonesia.

Selanjutnya, paragraf penutup dari berita di Kompas.com ini juga secara tidak langsung menunjukkan bagaimana masalah pengelolaan energi turut andil dalam terhambatnya perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Paragraf yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM melaporkan,

realisasi porsi EBT terhadap bauran energi nasional pada 2020 hanya bertambah 2,36 persen menjadi 11,51 persen dari 9,2 persen pada 2019.”

Masalah pengelolaan merupakan masalah yang ada dalam berita ini juga ditunjukkan dari tulisan yang mengatakan jika ada potensi kelebihan pasokan listrik. Tulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi ialah adanya potensi kelebihan pasokan listrik, di tengah pelemahan permintaan akibat pandemi Covid-19.”

Kalimat di atas jelas menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan energi. Indonesia bisa mengalami kelebihan pasokan listrik. Akibat dari adanya kelebihan pasokan listrik adalah, Indonesia dalam jangka waktu tertentu, tidak membutuhkan sumber energi baru, karena jika dibangun sumber energi baru, maka negara akan kesulitan untuk menyalurkan cadangan energi yang sudah dimiliki.

2) Diagnose Causes

Setidaknya ada dua penyebab utama yang menjadi penyebab dari terjadinya masalah managerial terkait pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Penyebab pertama adalah adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan surplus energi di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan tulisan dalam berita seperti berikut:

“Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi ialah adanya potensi kelebihan pasokan listrik, di tengah pelemahan permintaan akibat pandemi Covid-19.”

Berkurangnya permintaan listrik akibat adanya pandemi Covid 19 merupakan faktor utama. Selain itu, penyebab kedua adalah adanya megaprojek pembangkit listrik 35.000 MW yang hendak selesai sehingga membuat stok energi di Indonesia semakin melimpah sehingga menyebabkan banyak cadangan energi yang belum terserap. Melimpahnya cadangan energi di Indonesia menjadi

salah satu tantangan karena berarti untuk sementara Indonesia tidak membutuhkan sumber energi baru. Tulisan di dalam berita oleh Kompas.com yang mendukung adalah sebagai berikut:

“Kalau (proyek pembangkit 35.000 MW) ini diselesaikan, ditambah dengan adanya faktor keterlambatan penyerapan energi, perlambatan ekonomi disebabkan pandemi, maka kelebihan ini juga menjadi tantangan kita (meningkatkan bauran EBT).”

Jika pemerintah hendak membangun sumber-sumber energi baru terbarukan, maka cadangan energi yang sudah melimpah akan semakin bertambah lagi. Tentu saja hal tersebut menjadi suatu dilema tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi, energi di Indonesia sedang berlimpah, tapi di sisi lain, energi yang berlimpah tersebut berasal dari energi-energi fosil yang kurang ramah lingkungan.

Penyebab ketiga yang dikatakan menghambat perkembangan Energi Baru Terbarukan adalah persaingan dengan negara lain dalam menarik investasi dalam sektor Energi Baru Terbarukan. Hal tersebut sesuai dengan tulisan dalam berita seperti berikut:

“Kemudian, hambatan lain yang akan dihadapi dalam pengembangan bauran EBT ialah terkait pendanaan atau investasi sektor energi ramah lingkungan tersebut. Pasalnya Arifin menilai, saat ini berbagai pemerintah dari negara lain juga tengah berupaya menarik minat para investor untuk menggarap sektor EBT di negaranya. “Karena untuk merealisasikan proyek-proyek EBT ini dalam skala besar membutuhkan dana yang tinggi. Kompetisi ini yang juga harus kita antisipasi, dimana kita membuat investor tetap masuk ke Indonesia,” tutur dia.”

Selain adanya banyak energi yang belum terserap, untuk mengembangkan energi baru terbarukan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Permasalahan terkait dana juga berkaitan dengan perlombaan oleh negara-negara lain. Banyak negara yang sedang berlomba untuk menarik investor masuk ke negaranya untuk pengembangan energi baru terbarukan, seperti yang ditulis oleh Kompas.com sebagai berikut:

“Pasalnya Arifin menilai, saat ini berbagai pemerintah dari negara lain juga tengah berupaya menarik minat para investor untuk menggarap sektor EBT di negaranya.”

Dengan demikian, Indonesia perlu kerja lebih ekstra karena Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain juga. Selain mencari investor untuk pendanaan, Indonesia juga perlu mengantisipasi kompetisi yang mungkin terjadi dengan negara lain.

3) *Make Moral Judgement*

Dalam membongkai hambatan yang menghalangi perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia, Kompas.com menunjukkan bagaimana potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangat besar. Seperti apa yang ditulis oleh Kompas.com, yaitu sebagai berikut:

“Pemerintah mengakui adanya sejumlah tantangan dalam pengembangan bauran energi baru terbarukan (EBT) terhadap energi primer nasional, meskipun potensi energi bersih dalam negeri itu sangat besar.”

Penilaian moral dalam berita ini adalah Indonesia sebetulnya memiliki banyak sekali potensi energi bersih (energi baru terbarukan), meski begitu pengembangannya belum maksimal, sehingga mayoritas energi di Indonesia masih menggunakan energi fosil, energi yang kurang ramah lingkungan dan tidak terbarukan.

Pembungkahan yang dibuat oleh Kompas.com seperti suatu ironi, Indonesia dengan segala potensi energi terbarukannya, masih bertumpu di energi fosil. Misalnya, proyek pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW yang jika selesai, membuat Indonesia kelebihan energi dan menghambat perkembangan energi baru terbarukan.

4) *Treatment Recommendation*

Di balik setiap tantangan yang ada, Kompas.com mengangkat pernyataan dari menteri ESDM Arifin Tasrif yang mengatakan jika pemerintah akan menyusun strategi untuk meningkatkan porsi Energi Baru Terbarukan. Hal tersebut didukung oleh tulisan Kompas.com, yaitu:

“Ia bersama jajarannya tengah menyusun strategi untuk meningkatkan porsi energi bersih itu.”

Sudah waktunya Indonesia untuk beralih ke energi baru terbarukan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengembangkan energi baru di Indonesia. Itulah salah satu hal yang menjadi *treatment recommendation* oleh Kompas.com.

Selain itu, Arifin juga menyatakan jika Indonesia harus mengantisipasi dan berusaha untuk tetap bisa menarik investor masuk, sehingga perkembangan Energi Baru Terbarukan di Indonesia dapat berlanjut. Seperti apa yang tertulis, yaitu sebagai berikut:

“Kompetisi ini yang juga harus kita antisipasi, dimana kita membuat investor tetap masuk ke Indonesia.”

Banyak negara yang akan berusaha untuk menarik investor masuk guna pengembangan energi baru terbarukan di negara mereka, seperti yang ditulis oleh Kompas.com sebagai berikut:

“Pasalnya Arifin menilai, saat ini berbagai pemerintah dari negara lain juga tengah berupaya menarik minat para investor untuk menggarap sektor EBT di negaranya.”

Jika tidak berhati-hati dan jika Indonesia gagal mengantisipasinya, maka negara lain akan dilihat lebih menarik bagi investor. Jika Indonesia gagal menarik hati investor, maka investor akan beralih ke negara lain. Itulah mengapa, *treatment recommendation* kedua adalah untuk mengantisipasi persaingan yang ada. Sebab persaingan sudah pasti terjadi, tinggal bagaimana Indonesia bersiap untuk menghadapinya.

c. Judul Berita: Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Terbit: 24 April 2021

Tabel 4.3

Analisis Framing Model Robert N. Entman “Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024”

<i>Define Problem</i>	Masalah Ekonomi yang muncul akibat kurangnya pemanfaatan energi terbarukan oleh pemerintah.
<i>Diagnose Causes</i>	1) Kurangnya pemanfaatan energi baru terbarukan. 2) Kesalahan dalam pengembangan energi baru terbarukan.
<i>Make Moral Judgement</i>	Pengembangan energi baru terbarukan akan memberikan manfaat ekonomi.
<i>Treatment Recommendation</i>	Mendorong pemanfaatan dan pengembangan energi baru terbarukan.

1) Define Problem

Permasalahan ekonomi dalam berita ini dapat dilihat dari beberapa tulisan yang dimuat oleh Kompas.com. Pertama, riset untuk meningkatkan penggunaan minyak nabati sebagai bahan baku BBM. Tulisan yang mendukung bingkai Kompas.com jika berita ini mengangkat masalah ekonomi adalah sebagai berikut:

“Targetnya menghasilkan bensin, diesel, maupun avtur 100 persen dari bahan baku kelapa sawit, sehingga bisa mengurangi impor BBM.”

Kata-kata “sehingga bisa mengurangi impor BBM” berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ketika Indonesia sudah berhasil menciptakan BBM dari minyak nabati, maka impor BBM dapat dikurangi. Ketika impor BBM dapat dikurangi, Indonesia dapat menghemat APBN yang sebelumnya digunakan untuk impor, sehingga dapat dialokasikan dalam sektor-sektor lainnya.

Permasalahan ekonomi kembali muncul ketika Kompas.com menulis program prioritas ketiga oleh pemerintah. Program ketiga yang akan menjadi prioritas pemerintah adalah pengembangan energi terbarukan melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Permasalahan ekonomi muncul ketika Kompas.com menuliskan jika tidak banyak investor yang

berminat dalam pengembangan PLTP akibat besarnya biaya. Tulisan yang mengatakan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Menurut dia, hal itu dikarenakan selama ini skala pembangunan PLTP terlalu besar sehingga memakan biaya investasi yang mahal. Kondisi ini membuat tak banyak investor yang berminat.”

Hal terakhir yang menunjukkan jika bingkai Kompas.com dalam pemberitaan ini berkaitan dengan masalah ekonomi adalah ketika Kompas.com menulis tentang prioritas kelima pemerintah, yaitu pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dikatakan jika ekonomi Indonesia terus tumbuh, maka diperlukan pasokan energi yang memadai. Tulisan tersebut adalah sebagai berikut:

“Kelima, pengembangan teknologi nuklir. Ia mengatakan, saat ekonomi Indonesia terus tumbuh maka perlu diikuti pula dengan energi listrik yang memadai.”

Tiga pernyataan yang dikutip oleh Kompas.com tersebut menunjukkan jika masalah yang diangkat dalam berita tersebut adalah masalah ekonomi. Selain itu, langkah Kompas.com yang memasukkan berita ini ke dalam kategori berita *money* (uang/keuangan) juga menunjukkan jika berita ini membingkai energi terbarukan melalui sudut pandang masalah ekonomi atau keuangan.

2) Diagnose Causes

Penyebab dari masalah adalah kurangnya pemanfaatan energi baru terbarukan serta kesalahan dalam pengembangan energi baru terbarukan. Permasalahan ekonomi terjadi karena Indonesia kurang memanfaatkan potensi energi baru terbarukan yang dimiliki. Tulisan dalam berita yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Pertama, penggunaan bahan bakar nabati yang berasal dari kelapa sawit sebagai BBM. Targetnya menghasilkan bensin, diesel, maupun avtur 100 persen dari bahan baku kelapa sawit, sehingga bisa mengurangi impor BBM.”

Hingga saat ini, penggunaan BBM dalam negeri masih bergantung kepada BBM impor. Jika penggunaan bahan bakar nabati sudah mencapai 100 persen,

barulah Indonesia bisa lepas dari ketergantungan terhadap BBM impor. Kurangnya pemanfaatan bahan bakar nabati menyebabkan adanya permasalahan ekonomi, sehingga Indonesia perlu untuk mengimpor BBM dari luar negeri. Tulisan kedua yang menunjukkan permasalahan ekonomi terjadi karena kurangnya pemanfaatan energi baru terbarukan adalah sebagai berikut:

“Kedua, mendorong pemanfaatan biogas untuk penyediaan listrik di tempat-tempat terpencil. Saat ini biogas sudah banyak dipakai di perkebunan kelapa sawit sehingga diharapkan pemakaiannya semakin meluas.”

Jika Indonesia dapat memanfaatkan biogas secara maksimal, maka tidak akan adalagi masalah listrik di tempat-tempat terpencil. Permasalahannya adalah biogas belum dimanfaatkan secara maksimal. Baru perkebunan kelapa sawit yang sudah banyak memanfaatkan energi listrik yang bersumber dari biogas. Itulah mengapa pemerintah mengupayakan agar pemanfaatan biogas dapat digunakan secara lebih luas. Tulisan ini menunjukkan jika ada masalah ekonomi yang terjadi akibat dari kurangnya pemanfaatan biogas.

Hal kedua yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi adalah kesalahan dalam pengembangan energi terbarukan. Hal tersebut muncul ketika Kompas.com menuliskan pembahasan mengenai prioritas ketiga dari pemerintah, yaitu pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Menurut dia, hal itu dikarenakan selama ini skala pembangunan PLTP terlalu besar sehingga memakan biaya investasi yang mahal. Kondisi ini membuat tak banyak investor yang berminat.”

Kesalahan dalam menentukan skala pembangunan PLTP menyebabkan munculnya masalah ekonomi, yaitu tidak banyak investor yang berminat. Padahal, jika tidak ada kesalahan tersebut, maka masalah ekonomi tidak akan muncul dan proyek pengembangan PLTP dapat berjalan dengan baik.

3) Make Moral Judgement

Kurangnya pemanfaatan energi baru terbarukan menyebabkan manfaat yang seharusnya sudah dirasakan oleh masyarakat menjadi belum dapat dirasakan. Jika pengembangan energi baru terbarukan dapat berjalan dengan lancar, maka masyarakat maupun negara secara luas dapat merasakan manfaatnya. Bingkai tersebut secara berulang disampaikan oleh Kompas.com. Tulisan pertama yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Pertama, penggunaan bahan bakar nabati yang berasal dari kelapa sawit sebagai BBM. Targetnya menghasilkan bensin, diesel, maupun avtur 100 persen dari bahan baku kelapa sawit, sehingga bisa mengurangi impor BBM.”

Kompas.com menunjukkan jika penggunaan bahan bakar nabati dari kelapa sawit sebagai BBM sudah bisa mencapai 100 persen, maka manfaat yang akan didapatkan adalah negara bisa mengurangi jumlah impor BBM. Kedua, Kompas.com menuliskan jika biogas dapat digunakan untuk menyediakan listrik di tempat-tempat terpencil. Pengembangan biogas dapat memberikan manfaat untuk daerah-daerah terpencil, mereka tidak lagi perlu bergantung terhadap sumber listrik yang sulit diakses. Tulisan yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Kedua, mendorong pemanfaatan biogas untuk penyediaan listrik di tempat-tempat terpencil. Saat ini biogas sudah banyak dipakai di perkebunan kelapa sawit sehingga diharapkan pemakaiannya semakin meluas.”

Ketiga, Kompas.com mengatakan jika pengembangan PLTP dapat memberikan manfaat terhadap daerah sekitar. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Karena itu kita kembangkan PLTP skala kecil yang mudah-mudahan bisa dikembangkan di berbagai daerah kandungan panas bumi, sehingga listrik yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi daerah sekitarnya,”

Tiga tulisan di atas menunjukkan jika Kompas.com membingkai perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia akan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara. Lebih jauh lagi, Kompas.com mengisyaratkan

jika perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun negara.

Pengembangan bahan bakar nabati dapat membantu negara mengurangi biaya untuk impor BBM. Pengembangan biogas dapat membantu masyarakat di daerah terpencil untuk bisa mengakses listrik dengan lebih mudah dan infrastruktur yang lebih terjangkau. Pengembangan PLTP dapat membantu memberikan *supply* listrik yang cukup untuk daerah sekitar, sehingga ekonomi dapat berjalan lancar. Pengembangan baterai dapat memberi nilai ekonomi lebih, karena baterai dapat diekspor dan menambah pendapatan negara. Pengembangan energi nuklir untuk menjaga agar pasokan listrik tetap terjaga ketika pertumbuhan ekonomi negara sudah meningkat.

4) *Treatment Recommendation*

Rekomendasi yang diberikan oleh Kompas.com adalah mendorong pemanfaatan dan pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Dengan semakin banyak orang yang memanfaatkan dan mengembangkan energi baru terbarukan, maka permasalahan ekonomi yang muncul dapat teratasi. Lima prioritas yang disampaikan dan ditulis oleh Kompas.com semuanya berfokus kepada pemanfaatan dan pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Pertama adalah pengembangan bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar fosil. Jika pengembangan bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar fosil dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah dapat mengurangi penggunaan bahan bakar yang diimpor dari negara lain. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ditulis sebagai berikut:

“Targetnya menghasilkan bensin, diesel, maupun avtur 100 persen dari bahan baku kelapa sawit, sehingga bisa mengurangi impor BBM.

Kedua, Kompas.com mengutip pernyataan Bambang Brodjonegoro yang mendorong pemanfaatan biogas secara lebih luas, sehingga tempat-tempat terpencilpun dapat memiliki sumber listriknya sendiri. Tulisan yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Saat ini biogas sudah banyak dipakai di perkebunan kelapa sawit sehingga diharapkan pemakaiannya semakin meluas.”

Ketiga, mendorong adanya pengembangan PLTP dalam skala kecil. Kompas.com menuliskan pentingnya pengembangan PLTP dalam skala kecil sehingga dapat lebih banyak menarik investor. Tulisan yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Karena itu kita kembangkan PLTP skala kecil yang mudah-mudahan bisa dikembangkan di berbagai daerah kandungan panas bumi,”

Keempat, mendorong pengembangan baterai listrik lithium. Pengembangan baterai listrik lithium akan dapat dimanfaatkan dalam proyek peralihan kendaraan dari kendaraan bermotor menuju kendaraan listrik. Pemerintah mendorong adanya pengembangan baterai listrik lithium, hal tersebut sesuai dengan tulisan yang mendukung, yaitu sebagai berikut:

“Keempat, pengembangan baterai listrik lithium. Ada dua yang akan dihasilkan yaitu fast charging dan battery swap technology untuk kendaraan listrik, yang saat ini pemerintah sudah menjajaki kerja sama dengan berbagai perusahaan untuk pengembangannya.”

Terakhir, pemerintah mendorong adanya pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tujuannya adalah untuk menjaga agar pasokan listrik untuk masyarakat terus tercukupi di tengah perkembangan ekonomi di Indonesia. Tulisan yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Kelima, pengembangan teknologi nuklir. Ia mengatakan, saat ekonomi Indonesia terus tumbuh maka perlu diikuti pula dengan energi listrik yang memadai.”

Melalui kelima hal tersebut, pada dasarnya pemerintah mendorong peningkatan pengembangan serta pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Semakin banyak energi baru terbarukan yang berkembang dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, maka diharapkan ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih baik, karena masalah energi yang menjadi salah satu roda penggerak ekonomi di Indonesia sudah terselesaikan.

d. Judul Berita: Pengembangan Energi Baru Terbarukan di RI Perlu Insentif dan Perubahan Regulasi

Terbit: 28 April 2021

Tabel 4.4

Analisis Framing Model Robert N. Entman “Pengembangan Energi Baru Terbarukan di RI Perlu Insentif dan Perubahan Regulasi”

<i>Define Problem</i>	Masalah Ekonomi dan Masalah Regulasi dari pemerintah.
<i>Diagnose Causes</i>	1) Kurangnya insentif pemerintah terhadap pengembangan energi baru terbarukan. 2) Regulasi yang masih mengacu pada pemanfaatan energi fosil.
<i>Make Moral Judgement</i>	Potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia sangat besar, namun regulasi dan insentif dari pemerintah masih berfokus kepada pemanfaatan energi fosil.
<i>Treatment Recommendation</i>	1) Memperbaiki regulasi-regulasi yang masih mengacu kepada pemanfaatan energi fosil. 2) Memberikan insentif seperti pemerintah memberi insentif untuk pelanggan PLN.

1) Define Problem

Permasalahan yang muncul dalam berita ini adalah permasalahan terkait dengan masalah ekonomi serta masalah regulasi. Masalah pertama yang muncul dalam berita ini adalah masalah ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan melalui kurangnya insentif pemerintah untuk pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Bahkan, Kompas.com dalam berita ini menunjukkan jika sudah ada daerah-daerah di Indonesia yang sudah mandiri energi, tetapi pemerintah tidak memberi insentif apapun kepada mereka seperti insentif yang pemerintah berikan

kepada para pelanggan PLN. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Aris bercerita, salah satu desa di Lombok Utara, masyarakatnya sempat mengeluhkan karena tak mendapatkan insentif pembayaran listrik, seperti yang diberikan pemerintah pada pelanggan listrik PLN."

Menurut tulisan di Kompas.com, sebetulnya harga iuran listrik masih terbilang murah untuk ukuran kota besar, yaitu sebesar Rp 10.000,00. Namun, iuran sebesar itu terbilang mahal jika dibandingkan untuk orang-orang di daerah pedalaman. Hal tersebut menunjukkan adanya masalah ekonomi yang ditonjolkan oleh Kompas.com di dalam berita ini. Kata-kata yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut:

Ia bilang, memang biaya iuran warga untuk listrik yang didapat dari energi terbarukan terbilang murah untuk ukuran kota besar, yakni Rp 10.000 per bulan. Tetapi tidak demikian untuk di daerah pedalaman, nilai itu cukup besar."

Masyarakat mengharapkan adanya insentif dari pemerintah, sama seperti pemerintah memberi insentif untuk para pelanggan PLN. Kata-kata yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Aris bercerita, salah satu desa di Lombok Utara, masyarakatnya sempat mengeluhkan karena tak mendapatkan insentif pembayaran listrik, seperti yang diberikan pemerintah pada pelanggan listrik PLN."

Masalah kedua yaitu masalah regulasi yang ditunjukkan dengan adanya regulasi yang masih belum sesuai untuk perkembangan energi baru terbarukan. Kalimat yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Hal itu dapat dilakukan dengan memperbaiki regulasi-regulasi saat ini yang masih banyak mengacu pada pemanfaatan energi fosil. Padahal energi fosil perlu dikurangi untuk mencapai energi nol emisi."

Pemerintah Indonesia memiliki ambisi serta keinginan untuk beralih dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Bahkan banyak target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Tulisan Kompas.com yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Pemerintah pun berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan menggunakan sumber daya dalam negeri, serta hingga 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Di satu sisi, peran batubara dan minyak bumi perlu dikurangi."

Kurang relevannya regulasi yang ada saat ini dibingkai oleh Kompas.com sebagai masalah yang terjadi dalam perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Regulasi yang masih mengacu kepada pemanfaatan energi fosil merupakan hal yang menunjukkan adanya masalah regulasi dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

2) *Diagnose Causes*

Terdapat 2 penyebab dari masalah ekonomi dan masalah regulasi. Penyebab pertama adalah penyebab yang menunjukkan adanya masalah ekonomi yang ditonjolkan dalam berita ini. Kurangnya insentif dari pemerintah, terkhusus untuk pengembangan dan perawatan sumber energi baru terbarukan adalah penyebab munculnya masalah ekonomi di masyarakat. Di dalam berita yang diterbitkan oleh Kompas.com, dituliskan jika ada beberapa masyarakat yang protes kenapa mereka tidak mendapatkan insentif sama seperti para pelanggan PLN mendapatkan insentif dari pemerintah. Tulisan yang mengatakan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Aris bercerita, salah satu desa di Lombok Utara, masyarakatnya sempat mengeluhkan karena tak mendapatkan insentif pembayaran listrik, seperti yang diberikan pemerintah pada pelanggan listrik PLN."

Padahal, dalam upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi, pemerintah memberikan stimulus kepada para pelanggan PLN. Hal yang tidak pemerintah berikan kepada masyarakat yang memanfaatkan energi dari sumber energi baru terbarukan.

Permasalahan kedua yang muncul adalah masalah regulasi. Masalah regulasi terjadi karena pemerintah masih menerapkan regulasi-regulasi yang mengacu kepada pemanfaatan energi fosil. Bagaimana caranya Indonesia beralih menuju energi baru terbarukan, jika regulasi yang ada masih mengacu kepada

pemanfaatan energi fosil. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Hal itu dapat dilakukan dengan memperbaiki regulasi-regulasi saat ini yang masih banyak mengacu pada pemanfaatan energi fosil. Padahal energi fosil perlu dikurangi untuk mencapai energi nol emisi."

Kompas.com membingkai jika energi fosil sebetulnya sudah harus dikurangi untuk mencapai target energi nol emisi. Namun, regulasi yang ada masih banyak mengacu kepada pemanfaatan energi fosil dan regulasi yang ada perlu untuk diubah sehingga dapat mengakomodir pemanfaatan energi baru terbarukan.

3) Make Moral Judgement

Penilaian moral yang muncul adalah potensi energi baru terbarukan di Indonesia sebenarnya sangat besar, akan tetapi diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif dan juga regulasi yang tepat. Potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangatlah besar, buktinya ada daerah yang bisa mandiri energi melalui energi baru terbarukan dan bahkan bisa surplus energi dan menjual kelebihan energinya ke PLN. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Bahkan ada Desa Kamanggih di Sumba Timur yang sudah mandiri energi, mengandalkan listrik dari PLTMH yang dibangun di tepi Sungai Mbakuhau, bahkan kelebihan listriknya dijual ke PLN, ujarnya dalam acara soft launching buku, Selasa (28/4/2021)."

Namun ironisnya, dukungan pemerintah dalam bentuk pemberian insentif maupun pembuatan regulasi yang sesuai untuk energi baru terbarukan masih dirasa belum cukup. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjaga agar perkembangan energi baru terbarukan dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Namun pada prakteknya, dukungan pemerintah baik melalui insentif maupun pembuatan regulasi yang sesuai masih terfokus untuk energi yang bersumber dari pemanfaatan energi fosil. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kala itu sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memberikan stimulus pembebasan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA."

Tulisan kedua yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Hal itu dapat dilakukan dengan memperbaiki regulasi-regulasi saat ini yang masih banyak mengacu pada pemanfaatan energi fosil. Padahal energi fosil perlu dikurangi untuk mencapai energi nol emisi."

Kedua tulisan di atas menunjukkan bagaimana dukungan pemerintah masih berfokus kepada pemanfaatan energi fosil. Potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangatlah besar, namun dukungan pemerintah untuk pengembangan energi baru terbarukan masih kurang, dan pemerintah lebih banyak memberikan dukungan kepada sektor energi yang masih memanfaatkan energi fosil.

4) Treatment Recommendation

Terdapat 2 saran yang muncul dalam berita ini. Pertama adalah pemberian insentif oleh pemerintah untuk pengembangan energi baru terbarukan, sama seperti bagaimana pemerintah memberikan insentif untuk para pelanggan PLN. Tulisan dalam Kompas.com yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kendati demikian, pengembangan energi terbarukan ini sangat membutuhkan campur tangan pemerintah untuk bisa berkelanjutan. Salah satunya dukungan dalam hal insentif. Aris bercerita, salah satu desa di Lombok Utara, masyarakatnya sempat mengeluhkan karena tak mendapatkan insentif pembayaran listrik, seperti yang diberikan pemerintah pada pelanggan listrik PLN."

Tulisan tersebut menunjukkan jika Kompas.com ingin membingkai jika solusi dari masalah ekonomi yang muncul adalah dengan pemerintah memberikan insentif kepada warga. Jika para pelanggan PLN saja bisa mendapatkan pembebasan biaya dan juga potongan harga, mengapa warga yang sudah memanfaatkan energi baru terbarukan tidak dapat mendapatkan insentif yang sama?

Solusi kedua yang dapat mengatasi masalah regulasi adalah dengan mengubah regulasi-regulasi saat ini yang masih mengacu kepada pemanfaatan energi fosil menuju regulasi-regulasi yang mengacu kepada pemanfaatan energi baru terbarukan. Regulasi-regulasi pemerintah hingga saat ini masih mengacu kepada pemanfaatan energi fosil, perlu perubahan regulasi agar pemanfaatan dan pengembangan energi baru terbarukan dapat berjalan lancar. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Hal itu dapat dilakukan dengan memperbaiki regulasi-regulasi saat ini yang masih banyak mengacu pada pemanfaatan energi fosil. Padahal energi fosil perlu dikurangi untuk mencapai energi nol emisi."

Kompas.com sudah menunjukkan jika pengembangan energi baru terbarukan dapat berjalan dengan baik, asalkan masalah ekonomi dan masalah regulasi yang muncul dapat diselesaikan. Masalah ekonomi dapat selesai jika ada insentif dari pemerintah untuk pengembangan dan perawatan pembangkit listrik yang bertenagakan dari sumber energi baru terbarukan. Sedangkan masalah regulasi dapat selesai jika pemerintah mengubah regulasi yang ada, dari yang sebelumnya mengacu kepada pemanfaatan energi fosil, kepada regulasi yang mengacu kepada pemanfaatan energi baru terbarukan.

e. Judul Berita: Greenpeace Soroti Rencana PLN Membangun Pembangkit Listrik Batu Bara

Terbit: 16 Mei 2021

Tabel 4.5

Analisis Framing Model Robert N. Entman "Greenpeace Soroti Rencana PLN Membangun Pembangkit Listrik Batu Bara"

<i>Define Problem</i>	Masalah Lingkungan yang disebabkan oleh pemanfaatan energi kotor.
<i>Diagnose Causes</i>	PLN akan membangun PLTU baru yang memanfaatkan batu bara.

<i>Make Moral Judgement</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Energi fosil adalah energi yang kotor. 2) Membangun PLTU baru yang memanfaatkan energi fosil bertentangan dengan rekomendasi IPCC. 3) Membangun PLTU yang memanfaatkan energi kotor adalah hal yang buruk.
<i>Treatment Recommendation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menghentikan rencana pembangunan PLTU. 2) Membuat peta jalan untuk peralihan dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. 3) Melakukan moratorium terhadap PLTU mulai dari sekarang.

1) *Define Problem*

Permasalahan yang diangkat dalam berita ini adalah permasalahan lingkungan. **Proyek 35.000 MW yang didominasi dengan pembangunan banyak PLTU akan membawa banyak dampak buruk kepada lingkungan.** Kompas.com menunjukkan jika permasalahan lingkungan adalah permasalahan utama yang disajikan dalam berita kali ini. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Bila semua pembangkit berbasis energi kotor ini tetap berjalan, dengan usia operasional puluhan tahun, maka tidak mungkin kita akan mencapai nol emisi di 2050 dan itu hanya jadi sebatas mimpi yang tidak mungkin diwujudkan," ujarnya."

Kata-kata "berbasis energi kotor" menunjukkan jika pembangunan PLTU akan berdampak kepada lingkungan. Selanjutnya, Kompas.com juga menuliskan pendapat dari Adila Isfandiari yang mengatakan jika penyelesaian PLTU dapat memberikan resiko bagi negara, terutama untuk keuangan negara dan potensi bertambahnya emisi gas rumah kaca. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Risiko tersebut tentunya berkaitan dengan keuangan negara, dan juga bertambahnya emisi gas rumah kaca (GRK). Diketahui, jika dengan masa beroperasi PLTU rata-rata adalah 30-40 tahun, maka kondisi

tersebut akan mengunci emisi GRK serta mengurangi ruang bagi energi terbarukan untuk berkembang. Dikatakan Adila, penambahan PLTU batu bara baru dari proyek 35.000 MW dan FTP tentunya sangatlah bertentangan dengan rekomendasi IPCC. Seperti diketahui, rekomendasi IPCC ini adalah ketentuan di mana seluruh negara harus menutup 80 persen dari PLTU existing agar target 1,5 derajat Celcius seperti Perjanjian Paris bisa tercapai.”

Keseluruhan tulisan tersebut menunjukkan jika masalah lingkungan adalah masalah yang muncul dalam berita ini. Melalui pembangunan PLTU yang memanfaatkan energi kotor, maka emisi gas rumah kaca dapat bertambah dan hal tersebut juga bertentangan dengan rekomendasi IPCC.

2) *Diagnose Causes*

Penyebab dari masalah lingkungan yang muncul adalah rencana PLN untuk membangun sumber energi baru yang masih memanfaatkan energi batu bara yang dinilai kotor. PLN berencana untuk menyelesaikan proyek 35.000 MW yang mayoritas sumber energinya berasal dari energi batu bara. Bahkan pemerintah melalui Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan jika penambahan konstruksi pembangkit listrik dalam satu dekade ke depan masih akan didominasi oleh pembangkit listrik yang memanfaatkan energi fosil, yaitu batu bara. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyebut penambahan konstruksi pembangkit listrik dalam satu dekade mendatang masih akan didominasi energi fosil yang bersumber dari batu bara.”

Adila Isfandiari juga mengatakan jika pembangunan PLTU merupakan penyebab dari masalah lingkungan yang akan dan sudah muncul. Tulisan yang menyatakan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Bila semua pembangkit berbasis energi kotor ini tetap berjalan, dengan usia operasional puluhan tahun, maka tidak mungkin kita akan mencapai nol emisi di 2050 dan itu hanya jadi sebatas mimpi yang tidak mungkin diwujudkan.”

Tulisan di atas jelas menunjukkan bagaimana pembangunan PLTU yang masih memanfaatkan energi kotor dan bahkan memiliki usia operasional hingga puluhan tahun merupakan penyebab utama dari masalah lingkungan yang muncul. Pihak yang menyebabkan munculnya permasalahan adalah pemerintah melalui kementerian ESDM dan juga PLN.

3) *Make Moral Judgement*

Penilaian moral yang secara konsisten muncul dalam berita ini adalah pembangunan PLTU yang memanfaatkan energi kotor akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan bertentangan dengan rekomendasi IPCC. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dalam laporan tersebut menunjukkan bahkan dengan skema energi terbarukan, di tahun 2030, Indonesia hanya mampu mencapai 26 persen energi terbarukan dibandingkan 50 persen energi terbarukan yang dibutuhkan untuk mencegah kenaikan suhu di atas 1,5 derajat Celcius. Oleh karena itu, menurut dia, dalam skema energi terbarukan terbaik, Indonesia harus melakukan moratorium PLTU batu bara saat ini, tanpa menunggu penyelesaian proyek 35.000 MW dan FTP II untuk bisa mencapai target 1,5 derajat Celcius di 2050."

Tulisan lain yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Diketahui, jika dengan masa beroperasi PLTU rata-rata adalah 30-40 tahun, maka kondisi tersebut akan mengunci emisi GRK serta mengurangi ruang bagi energi terbarukan untuk berkembang."

Kompas.com secara terus menerus menuliskan pendapat dari Adila yang mengatakan jika pembangunan PLTU akan berdampak terhadap emisi gas rumah kaca di Indonesia dan tidak dapat membantu mencegah kenaikan suhu di dunia. Di sisi lain, pembangunan PLTU jika terus dilanjutkan tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh IPCC, tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dikatakan Adila, penambahan PLTU batu bara baru dari proyek 35.000 MW dan FTP tentunya sangatlah bertentangan dengan rekomendasi IPCC."

Keseluruhan hal tersebut menunjukkan jika membangun PLTU yang masih bersumber kepada energi batu bara yang kotor merupakan hal yang buruk, tidak sesuai dengan rekomendasi IPCC dan dapat membawa dampak negatif bagi lingkungan.

4) *Treatment Recommendation*

Setidaknya ada 3 rekomendasi penyelesaian yang dituliskan oleh Kompas.com. Rekomendasi pertama adalah menghentikan rencana pembangunan PLTU. Rekomendasi kedua adalah membuat peta jalan peralihan energi, dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Rekomendasi ketiga adalah melakukan moratorium terhadap PLTU mulai dari sekarang.

Rekomendasi untuk menghentikan pembangunan PLTU sudah muncul sejak paragraf awal berita dan ditulis secara terang-terangan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Greenpeace Indonesia menyoroti rencana Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait pembangunan pembangkit listrik berbasis batu bara. Organisasi ini meminta agar rencana tersebut dihentikan."

Selanjutnya dijelaskan juga mengapa *Greenpeace* Indonesia merekomendasikan agar proyek pembangunan PLTU dihentikan. Pertama karena akan memberikan efek negatif terhadap lingkungan, kedua, karena tidak sesuai dengan rekomendasi IPCC.

Rekomendasi kedua adalah membuat peta jalan peralihan energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan, rekomendasi kedua ditunjukkan dalam tulisan sebagai berikut:

"Greenpeace Indonesia juga mengingatkan agar rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis batu bara, harus diikuti dengan peta jalan yang jelas."

Tulisan lain yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Niatan baik PLN ini harus disertai dengan peta jalan yang jelas untuk coal phase phase-out pembangkit listrik tenaga uap yang sudah berjalan dan yang sedang dalam proses pembangunan, sesuai dengan skenario net-zero emission yang telah dibuat PLN."

Kedua tulisan tersebut menunjukkan secara jelas jika PLN perlu untuk membuat sebuah peta jalan untuk peralihan, terutama peta jalan untuk mengurangi penggunaan PLTU dan bukan sebaliknya, menambah penggunaan PLTU.

Rekomendasi terakhir adalah melakukan moratorium PLTU mulai dari sekarang. Rekomendasi ketiga ini masih berhubungan dengan rekomendasi kedua, yaitu untuk membuat peta jalan peralihan energi, dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Moratorium akan membantu pemerintah untuk melaksanakan program peralihan dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Oleh karena itu, menurut dia, dalam skema energi terbarukan terbaik, Indonesia harus melakukan moratorium PLTU batu bara saat ini, tanpa menunggu penyelesaian proyek 35.000 MW dan FTP II untuk bisa mencapai target 1,5 derajat Celcius di 2050. "

Diharapkan melalui tiga rekomendasi tersebut, maka masalah lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan energi fosil dapat segera ditanggulangi dan perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia dapat dipercepat.

f. Judul Berita: Pemerintah Target Porsi Energi Terbarukan Capai 48 Persen Hingga 2030

Terbit: 5 Juni 2021

Tabel 4.6

Analisis Framing Model Robert N. Entman "Pemerintah Target Porsi Energi Terbarukan Capai 48 Persen Hingga 2030"

<i>Define Problem</i>	Masalah Managerial oleh pemerintah.
<i>Diagnose Causes</i>	1) Komitmen Presiden Joko Widodo pada COP 21 tahun 2015. 2) Adanya target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025. 3) Adanya kemungkinan permintaan listrik yang

	akan naik.
<i>Make Moral Judgement</i>	1) RUPTL 2021-2030 adalah RUPTL yang lebih hijau. 2) RUPTL 2021-2030 sesuai dengan target pemerintah.
<i>Treatment Recommendation</i>	1) Menyusun program dan regulasi untuk mengurangi penggunaan energi fosil secara natural.

1) *Define Problem*

Permasalahan utama yang muncul dari berita ini adalah persoalan manajemen dan pengelolaan energi baru terbarukan oleh pemerintah, terkhusus kementerian ESDM dan juga PLN. Berita ini menjelaskan rencana-rencana pemerintah dalam 10 tahun ke depan yang tertuang di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030. Tulisan dalam berita yang mengatakan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Hal itu tertuang dalam draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2021-2030. Adapun target itu meningkat dibanding RUPTL 2019-2028 yang masih di kisaran 30 persen."

Kompas.com dalam berita ini ingin menunjukkan jika rencana penyediaan listrik dalam RUPTL 2021-2030 mulai beralih ke arah energi bersih. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kami ingin RUPTL yang sedang disusun saat ini adalah RUPTL yang greener, lebih hijau. Dalam artian, porsi EBT lebih baik daripada versi RUPTL sebelumnya."

Pembahasan mengenai RUPTL serta rencana-rencana pemerintah di dalam pengembangan sumber energi yang baru menunjukkan jika masalah yang diangkat di dalam berita ini adalah masalah pengelolaan. Selanjutnya, kebijakan yang diambil pemerintah juga mulai menunjukkan bagaimana pemerintah hendak

serius untuk beralih dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kebijakan tersebut antara lain konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit EBT, co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, retirement pembangkit tua, dan relokasi pembangkit ke sistem yang memerlukan."

Kebijakan konversi PLTD menuju pembangkit EBT, co-firing PLTU batubara, pensiun pembangkit listrik tua dan relokasi pembangkit listrik ke tempat yang lebih memerlukan menunjukkan jika pemerintah hendak memaksimalkan pengelolaan sumber energi di Indonesia.

2) *Diagnose Causes*

Penyebab dari masalah yang dibahas di dalam berita ini adalah Komitmen Presiden Joko Widodo pada COP 21 tahun 2015, adanya target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan adanya kemungkinan permintaan listrik yang akan naik. Pertama, karena presiden Joko Widodo menyampaikan target *Net Zero Emission (NZE)* pada tahun 2015, maka kementerian ESDM beserta seluruh pihak yang terkait berusaha untuk meningkatkan pengelolaan energi, sehingga porsi energi baru terbarukan dapat meningkat. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Sejalan dengan pembahasan RUPTL hijau, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pun tengah merancang template Net Zero Emission (NZE), sebagai perwujudan realisasi komitmen Presiden Joko Widodo pada COP 21 tahun 2015."

Pihak-pihak terkait sedang berusaha untuk menyusun program pengelolaan yang sesuai dan juga dapat diterima. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kami sedang menyusun program, termasuk regulasinya, bagaimana mengurangi porsi pembangkit (fosil) secara natural. Namun yang menjadi penting juga, bagaimana kita memenuhi permintaan yang diyakini akan naik, serta di sisi lain mengurangi operasional pembangkit batubara dan kemudian menggantikannya. Kita sedang merancang template NZE seperti apa, minimum dari pembangkitan."

Penyebab kedua mengapa pihak-pihak terkait tengah mencoba memaksimalkan pengelolaan energi adalah adanya target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Rida mengatakan, penyusunan RUPTL kali ini sejalan dengan target bauran EBT sebesar 23 persen di tahun 2025."

Terakhir, hal yang menyebabkan pengelolaan terhadap energi baru terbarukan perlu untuk ditingkatkan adalah karena ada potensi meningkatnya permintaan energi. Pemerintah perlu mengantisipasi potensi kenaikan permintaan energi tersebut dan membuat langkah-langkah yang tepat, terutama dengan mengubah sumber energi utama dari energi fosil ke energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Tulisan yang menyatakan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Namun yang menjadi penting juga, bagaimana kita memenuhi permintaan yang diyakini akan naik, serta di sisi lain mengurangi operasional pembangkit batubara dan kemudian menggantikannya. Kita sedang merancang template NZE seperti apa, minimum dari pembangkitan."

Ketiga penyebab tadi yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan dalam proses pengelolaan energi. Dari yang sebelumnya berfokus kepada energi fosil, beralih untuk berfokus kepada energi baru terbarukan.

3) Make Moral Judgement

Ada 2 penilaian yang muncul dalam berita ini terkait dengan bagaimana rencana pengelolaan energi oleh pemerintah. Pertama, RUPTL 2021-2030 adalah RUPTL yang lebih hijau. Kedua, RUPTL 2021-2030 sesuai dengan target pemerintah. RUPTL 2021-2030 merupakan RUPTL yang mengedepankan energi bersih ditunjukkan dengan rencana pemerintah untuk secara bertahap mengganti pembangkit listrik yang menggunakan energi kotor, menjadi pembangkit listrik yang menggunakan energi bersih. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kebijakan tersebut antara lain konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit EBT, co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, retirement pembangkit tua, dan relokasi pembangkit ke sistem yang memerlukan."

Pemerintah menginginkan RUPTL 2021-2030 meningkatkan porsi energi baru terbarukan, sehingga porsi energi baru terbarukan menjadi lebih banyak jika dibandingkan dengan RUPTL sebelumnya. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kami ingin RUPTL yang sedang disusun saat ini adalah RUPTL yang greener, lebih hijau. Dalam artian, porsi EBT lebih baik daripada versi RUPTL sebelumnya."

Selanjutnya, penilaian kedua adalah isi dari RUPTL 2021-2030 dinilai sudah sesuai dengan rencana pemerintah, terutama target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Berita ini ingin menunjukkan jika RUPTL yang merupakan wujud pengelolaan energi sudah sesuai dengan target pemerintah. Tulisan yang menyatakan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Rida mengatakan, penyusunan RUPTL kali ini sejalan dengan target bauran EBT sebesar 23 persen di tahun 2025."

Keseluruhan kutipan di atas menunjukkan bagaimana RUPTL 2021-2030 ini adalah RUPTL yang lebih mengedepankan energi bersih dan juga merupakan RUPTL yang sesuai dengan apa yang menjadi target pemerintah.

4) Treatment Recommendation

Rekomendasi penyelesaian yang ditawarkan di dalam berita ini adalah menyusun program dan regulasi untuk mengurangi penggunaan energi fosil secara natural. RUPTL 2021-2030 sudah berisikan program-program yang mulai mengalihkan penggunaan energi fosil kepada penggunaan energi baru terbarukan. Meski begitu, penyusunan program serta regulasi pendukung masih diperlukan guna mendukung keberhasilan RUPTL 2021-2030. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kami sedang menyusun program, termasuk regulasinya, bagaimana mengurangi porsi pembangkit (fosil) secara natural."

Langkah nyata dari program pengurangan penggunaan energi fosil ditunjukkan dalam tulisan sebagai berikut:

"Kebijakan tersebut antara lain konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit EBT, co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, retirement pembangkit tua, dan relokasi pembangkit ke sistem yang memerlukan."

Selain itu, pemerintah juga memiliki rencana untuk mengurangi dan menggantikan operasional PLTU. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Namun yang menjadi penting juga, bagaimana kita memenuhi permintaan yang diyakini akan naik, serta di sisi lain mengurangi operasional pembangkit batubara dan kemudian menggantikannya. Kita sedang merancang template NZE seperti apa, minimum dari pembangkitan."

Semua penjabaran di atas menunjukkan jika pembuatan serta realisasi program dan regulasi untuk peralihan energi dari energi fosil menuju energi terbarukan merupakan solusi yang ditawarkan di dalam berita.

g. Judul Berita: Genjot Energi Terbarukan, Pemerintah Bakal Hentikan Proyek PLTU

Terbit: 14 Juni 2021

Tabel 4.7

Analisis Framing Model Robert N. Entman "Genjot Energi Terbarukan, Pemerintah Bakal Hentikan Proyek PLTU"

<i>Define Problem</i>	Masalah Ekonomi di masyarakat terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan oleh pemerintah.
<i>Diagnose Causes</i>	Perubahan dari sumber energi fosil menuju sumber energi terbarukan akan menyebabkan perubahan

	harga energi.
<i>Make Moral Judgement</i>	Harga listrik dapat berubah akibat dari penggunaan pembangkit listrik energi baru terbarukan. Perubahan tersebut adalah harga listrik menjadi lebih murah dibandingkan dengan PLTU dan dilihat sebagai hal yang positif.
<i>Treatment Recommendation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengesahkan Perpres yang mengatur harga listrik dari pembangkit listrik energi baru terbarukan. 2) Membuat regulasi untuk mengurangi resiko investasi serta mempermudah proses pendanaan proyek EBT. 3) Melakukan penyesuaian pembangunan pembangkit listrik, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1) *Define Problem*

Masalah ekonomi sangat jelas muncul di dalam berita ini. Pertama, berita ini dimasukkan di dalam kategori *money* (uang atau finansial). Kedua, permasalahan yang dibahas di dalam berita berkaitan dengan harga listrik dari pembangkit listrik EBT, investasi yang diperlukan dalam membangun pembangkit listrik EBT dan penyesuaian-penyesuaian pembangunan pembangkit listrik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tulisan yang menunjukkan adanya pembahasan mengenai harga listrik adalah sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan, upaya memangkas hambatan harga jual listrik dengan semakin meningkatnya pembangkit EBT bakal diselesaikan lewat Perpres harga listrik yang kini masih berproses. Adapun, rancangan perpres harga listrik EBT ini ditargetkan akan rampung jika RUPTL 2021-2030 telah dituntaskan."

Selain itu, Kompas.com juga menuliskan jika Perpres perlu dibuat untuk memberi kepastian terkait harga listrik, sehingga dari sisi pengembang maupun

PLN bisa sama-sama diuntungkan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dadan mengungkapkan, tujuan penyusunan Perpres EBT juga untuk meningkatkan kepastian dari sisi harga listrik EBT baik untuk pengembang maupun PLN selaku off taker."

Bahasan lain berkaitan dengan harga listrik dari pembangkit listrik tenaga EBT yang lebih murah dibanding pembangkit listrik yang menggunakan tenaga fosil. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut, untuk harga listrik PLTS saat ini sudah di bawah US\$ 6 cent per kWh dan lebih murah ketimbang harga yang ditawarkan PLTU. Bahkan, harga listrik PLTS yang dilengkapi battery storage pun diklaim juga lebih murah ketimbang pembangkit peaker."

Permasalahan mengenai investasi sedikit dibahas di dalam berita. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Pemerintah perlu mendukung dengan regulasi yang dapat mengurangi resiko investasi dan meningkatkan bankability proyek EBT. Kalau tidak, susah pendanaannya."

Terakhir adalah pembahasan mengenai adanya penyesuaian kapasitas dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga EBT guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Merujuk draft RUPTL 2021-2030, terdapat sejumlah perubahan pada RUPTL kali ini terhadap RUPTL 2019-2028. Dari sisi pertumbuhan listrik yang sebelumnya 6,4 persen disesuaikan menjadi 4,9 persen. Dengan turunnya proyeksi permintaan ini, maka beberapa COD pembangkit juga mengalami penyesuaian dari semula mencapai 56.395 MW menjadi sebesar 40.901 MW. Transmisi menjadi 46.962 kms dari sebelumnya 57.293 kms dan gardu induk sebesar 74.512 MVA dari sebelumnya mencapai 124.341 MVA. Adapun, penambahan pelanngan diprediksi mencapai 25"

Seluruh pembahasan di atas menunjukkan bagaimana masalah ekonomi menjadi topik utama yang dibahas di dalam pemberitaan oleh Kompas.com ini.

2) *Diagnose Causes*

Penyebab dari munculnya masalah ekonomi di dalam pemberitaan adalah adanya perubahan dari pembangkit listrik tenaga fosil menuju pembangkit listrik tenaga EBT yang menyebabkan adanya perubahan harga. Peralihan sumber energi dari sumber energi fosil menuju sumber energi terbarukan mengakibatkan adanya penyesuaian harga, hingga pemerintah perlu menetapkan Perpres yang mengatur terkait harga listrik dari sumber energi terbarukan. Tulisan di dalam berita yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan, upaya memangkas hambatan harga jual listrik dengan semakin meningkatnya pembangkit EBT bakal diselesaikan lewat Perpres harga listrik yang kini masih berproses."

Perpres mengenai harga listrik dari sumber energi terbarukan diperlukan guna menjaga agar pengembang dan PLN sama-sama diuntungkan dan perkembangan EBT tidak terhambat. Dalam kasus yang ditulis oleh Kompas.com, sebenarnya energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga EBT memiliki harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga energi fosil. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut, untuk harga listrik PLTS saat ini sudah di bawah US\$ 6 cent per kWh dan lebih murah ketimbang harga yang ditawarkan PLTU. Bahkan, harga listrik PLTS yang dilengkapi battery storage pun diklaim juga lebih murah ketimbang pembangkit peaker."

Perlunya pembuatan Perpres maupun adanya penyesuaian harga listrik dari pembangkit bertenaga EBT menunjukkan jika perubahan harga dan biaya dari pembangkit bertenaga EBT adalah penyebab dari timbulnya masalah ekonomi.

3) *Make Moral Judgement*

Perubahan harga yang terjadi tidak dimaknai secara buruk. Bahkan, perubahan harga yang ada sebenarnya dimaknasi secara positif, karena harga listrik menjadi lebih murah jika dibanding dengan sebelumnya. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut, untuk harga listrik PLTS saat ini sudah di bawah US\$ 6 cent per kWh dan lebih murah ketimbang harga yang ditawarkan PLTU. Bahkan, harga listrik PLTS yang dilengkapi battery storage pun diklaim juga lebih murah ketimbang pembangkit peaker."

Tulisan di atas juga menunjukkan bagaimana peralihan dari sumber energi fosil menuju sumber energi baru terbarukan menyebabkan adanya perubahan harga listrik. Akibat dari adanya perubahan harga listrik tersebut, Perpres baru mengenai EBT perlu dibuat guna menjaga agar PLN maupun pengembang energi baru terbarukan sama-sama diuntungkan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan, upaya memangkas hambatan harga jual listrik dengan semakin meningkatnya pembangkit EBT bakal diselesaikan lewat Perpres harga listrik yang kini masih berproses. Adapun, rancangan perpres harga listrik EBT ini ditargetkan akan rampung jika RUPTL 2021-2030 telah dituntaskan. RUPTL-nya diselesaikan, kemudian digunakan sebagai referensi dalam pembahasan rancangan perpres di Kemenkeu."

Perubahan harga yang muncul tidak dimaknai secara negatif, sebaliknya dimaknai secara positif. Meski begitu, peraturan yang jelas tetap diperlukan guna menjaga agar tidak terjadi hambatan di kemudian hari.

4) Treatment Recommendation

Rekomendasi solusi yang diberikan di dalam berita adalah Mengesahkan Perpres yang mengatur harga listrik dari pembangkit listrik energi baru terbarukan dan melakukan penyesuaian pembangunan pembangkit listrik, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyusunan Perpres terkait dengan EBT diperlukan untuk menanggulangi hambatan harga listrik yang timbul akibat

adanya peralihan sumber energi. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan, upaya memangkas hambatan harga jual listrik dengan semakin meningkatnya pembangkit EBT bakal diselesaikan lewat Perpres harga listrik yang kini masih berproses. Adapun, rancangan perpres harga listrik EBT ini ditargetkan akan rampung jika RUPTL 2021-2030 telah dituntaskan. RUPTL-nya diselesaikan, kemudian digunakan sebagai referensi dalam pembahasan rancangan perpres di Kemenkeu."

Diharapkan, dengan dibuatnya Perpres, maka kepastian harga listrik dapat tercapai dan sama-sama menguntungkan baik untuk PLN maupun untuk pihak-pihak pengembang EBT. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dadan mengungkapkan, tujuan penyusunan Perpres EBT juga untuk meningkatkan kepastian dari sisi harga listrik EBT baik untuk pengembang maupun PLN selaku off taker."

Selain itu, Kompas.com juga menuliskan jika pemerintah perlu membuat regulasi yang sesuai guna mengurangi resiko investasi dan meningkatkan kemudahan dalam pendanaan pengembangan proyek EBT. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Pemerintah perlu mendukung dengan regulasi yang dapat mengurangi resiko investasi dan meningkatkan bankability proyek EBT. Kalau tidak, susah pendanaannya."

Terakhir adalah, Kompas.com menuliskan jika pemerintah perlu dan akan melakukan penyesuaian dalam beberapa proyek yang dibuat dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tulisan yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dari sisi pertumbuhan listrik yang sebelumnya 6,4 persen disesuaikan menjadi 4,9 persen. Dengan turunnya proyeksi permintaan ini, maka beberapa COD pembangkit juga mengalami penyesuaian dari semula mencapai 56.395 MW menjadi sebesar 40.901 MW."

Melalui penyesuaian tersebut diharapkan pembangunan pembangkit listrik dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut juga dapat berdampak kepada biaya pengembangan yang juga turut disesuaikan.

h. Judul Berita: Semester I 2021, Pembangkit Energi Baru Terbarukan Bertambah 217 Megawatt

Terbit: 20 Agustus 2021

Tabel 4.8

Analisis Framing Model Robert N. Entman “Semester I 2021, Pembangkit Energi Baru Terbarukan Bertambah 217 Megawatt”

<i>Define Problem</i>	Masalah Manajerial penambahan pembangkit listrik tenaga EBT oleh pemerintah.
<i>Diagnose Causes</i>	Laporan kementerian ESDM tentang penambahan pembangkit EBT sebesar 217 MW sepanjang semester 1 tahun 2022.
<i>Make Moral Judgement</i>	Penambahan pembangkit listrik tenaga EBT sebesar 217 MW merupakan hal yang bagus. Penambahan pembangkit listrik tenaga EBT selama semester 1 2021 masih kurang untuk dapat mencapai target 2025. Pemerintah optimis target dapat tercapai.
<i>Treatment Recommendation</i>	1) Menyusun tarif ekspor impor listrik. 2) Kerja empat sampai lima kali lipat dari sekarang sehingga target 2025 dapat tercapai. 3) Merampungkan rencana RUPTL 2021-2030.

1) Define Problem

Masalah manajerial adalah permasalahan utama yang muncul di dalam berita ini. Terutama berkaitan dengan manajemen pembangkit listrik tenaga EBT. Penambahan-penambahan pembangkit listrik bertenaga EBT menunjukkan

bagaimana pengelolaan energi baru terbarukan sudah mulai berkembang ke arah yang lebih baik di Indonesia. Salah satu tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat terjadi pertumbuhan kapasitas pembangkit energi terbarukan sebesar 217 megawatt sepanjang semester I tahun ini."

Detail penambahan pembangkit listrik bertenagakan EBT adalah sebagai berikut:

"Total tambahan 217 megawatt tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Malea sebesar 90 megawatt, pembangkit listrik tenaga minihidro sembilan unit berkapasitas 56 megawatt, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap sebesar 13 megawatt, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sorik Marapi Unit II berkapasitas 45 megawatt, dan pembangkit listrik tenaga bioenergi sebesar 12,5 megawatt."

Jumlah penambahan pembangkit listrik EBT tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah melalui PLN terus melakukan upaya pengelolaan dan pemaksimalan energi baru terbarukan. Meski begitu, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT baru sekitar 1.478 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4 persen setiap tahunnya. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Selama kurun waktu lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan sebesar 1.478 megawatt dengan kenaikan rata-rata sebesar 4 persen per tahun."

Pertambahan dan pengembangan pembangkit EBT menunjukkan bagaimana pemerintah melalui PLN melakukan fungsi pengelolaan.

2) *Diagnose Causes*

Penyebab dari diangkatnya masalah pengelolaan oleh pemerintah melalui PLN ini adalah adanya laporan dari PLN tentang adanya penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 217 MW sepanjang semester 1 tahun 2021. Penambahan kapasitas tersebut menunjukkan adanya proses pengelolaan sumber daya EBT

yang dilakukan oleh PLN. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat terjadi pertumbuhan kapasitas pembangkit energi terbarukan sebesar 217 megawatt sepanjang semester I tahun ini."

Selanjutnya, dikatakan jika salah satu faktor pendorong pertumbuhan pembangkit energi bersih adalah pembangkit bertenaga surya. Potensi tenaga surya di Indonesia sangatlah besar, sedangkan penggunaannya masih sedikit. Memaksimalkan potensi yang ada dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan pembangkit EBT di Indonesia. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dadan mengungkapkan bahwa salah satu faktor pendorong pertumbuhan pembangkit energi bersih bisa melalui energi surya. Menurutnya, potensi listrik tenaga matahari itu mencapai 207,8 gigawatt di Indonesia. Namun, angka pemanfaatan saat ini masih sekitar 0,1 persen. "Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan PLTS, salah satunya melalui PLTS atap," ujar Dadan."

Pertambahan pembangkit listrik EBT menunjukkan bagaimana keseriusan pemerintah dalam melakukan pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

3) Make Moral Judgement

Perkembangan pembangkit EBT di Indonesia merupakan hal yang positif dan berdampak baik bagi pertumbuhan penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia. Kompas.com membingkai penambahan sumber energi EBT sebagai suatu hal yang positif. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Ini capaian bagus, tapi untuk mencapai target bauran 23 persen harus kerja empat sampai lima kali lipat dari sekarang, sehingga di tahun 2025 bisa mendeklarasikan target yang ditetapkan 23 persen."

Meski begitu, dalam tulisan di atas juga terlihat adanya peringatan yang dituliskan. Perkembangan yang sudah ada memang merupakan hal yang bagus, akan tetapi hal tersebut masih kurang jika Indonesia ingin target 23 persen bauran

energi baru terbarukan dapat tercapai pada tahun 2025. Selain pendapat jika penambahan pembangkit EBT merupakan hal yang positif, Kompas.com juga menunjukkan perasaan khawatir dan peringatan bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras agar target dapat tercapai. Meski begitu, Kompas.com menuliskan jika pemerintah tetap optimis jika target dapat tercapai. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Pemerintah optimistis mampu mencapai target bauran energi bersih dalam empat tahun mendatang. Salah satu yang ditempuh pemerintah adalah merampungkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) milik PLN tahun 2021-2030."

Keseluruhan tulisan di atas menunjukkan jika Kompas.com ingin menunjukkan jika penambahan pembangkit EBT merupakan hal yang positif. Di sisi lain, sekalipun perlu kerja yang ekstra agar target bauran energi 23% dapat tercapai pada tahun 2025, Kompas.com menuliskan jika pemerintah cukup optimis jika mereka mampu mencapai target tersebut.

4) Treatment Recommendation

Ada tiga rekomendasi yang dituliskan oleh Kompas.com. Pertama adalah menyusun tarif ekspor impor listrik, kedua adalah bekerja empat sampai lima kali lipat dari sekarang sehingga target 2025 dapat tercapai, ketiga adalah merampungkan rencana RUPTL 2021-2030.

Menyusun tarif ekspor impor listrik bertujuan untuk mendorong jumlah PLTS atap pada level masyarakat. Diharapkan kebijakan ini dapat membuat semakin banyak masyarakat yang ingin memasang PLTS di atap rumah mereka. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kementerian ESDM sedang menyusun tarif ekspor impor listrik atau feed in tariff yang sebelumnya 1:0,65 menjadi 1:1 untuk mendorong peningkatan jumlah PLTS atap pada level masyarakat."

Kedua, pemerintah perlu untuk bekerja empat hingga lima kali lebih keras dari sekarang. Sekalipun kerja yang sudah dilakukan cukup bagus, akan tetapi itu belum cukup untuk mengejar ketertinggalan target. Itulah mengapa, pemerintah

disarankan untuk bekerja lebih keras lagi. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Ini capaian bagus, tapi untuk mencapai target bauran 23 persen harus kerja empat sampai lima kali lipat dari sekarang, sehingga di tahun 2025 bisa mendeklarasikan target yang ditetapkan 23 persen."

Ketiga, Kompas.com menuliskan jika menyelesaikan RUPTL 2021-2030 merupakan salah satu cara untuk mencapai target bauran energi 23% pada tahun 2025. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Pemerintah optimistis mampu mencapai target bauran energi bersih dalam empat tahun mendatang. Salah satu yang ditempuh pemerintah adalah merampungkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) milik PLN tahun 2021-2030."

Ketiga hal di atas merupakan rekomendasi yang dituliskan oleh Kompas.com, sehingga pengelolaan pemerintah terhadap sumber energi baru terbarukan dapat menjadi lebih baik dan target bauran energi 23% di tahun 2025 dapat tercapai.

i. Judul Berita: Pembiayaan Energi Terbarukan Butuh Dukungan Kebijakan Nyata Pemerintah

Terbit: 27 September 2021

Tabel 4.9.

Analisis Framing Model Robert N. Entman "Pembiayaan Energi Terbarukan Butuh Dukungan Kebijakan Nyata Pemerintah"

<i>Define Problem</i>	Masalah Ekonomi dan Masalah Regulasi oleh pemerintah.
<i>Diagnose Causes</i>	1) Kebijakan pemerintah belum mengakomodir kebutuhan untuk pengembangan energi baru terbarukan. 2) Adanya penetapan target yang tidak konsisten oleh pemerintah.
<i>Make Moral Judgement</i>	Kebijakan pemerintah belum berpihak kepada

	energi baru terbarukan.
<i>Treatment Recommendation</i>	1) Membuat target yang konsisten. 2) Mengedepankan kebijakan yang nyata untuk pengembangan energi baru terbarukan.

1) *Define Problem*

Permasalahan ekonomi adalah permasalahan yang sangat ditonjolkan di dalam berita ini. Permasalahan ekonomi bahkan sudah terlihat dari judul berita, yaitu “Pembiayaan Energi Terbarukan Butuh Dukungan Kebijakan Nyata Pemerintah”. Masalah pembiayaan merupakan masalah ekonomi. Selain itu, permasalahan kebijakan (regulasi) juga dibahas, sekalipun seluruh pembahasan tersebut berujung kepada masalah ekonomi.

Kompas.com menunjukkan jika Indonesia perlu rencana jangka panjang makro ekonomi dengan cara dekarbonisasi. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Oleh karena itu, kita butuh rencana jangka panjang makro ekonomi dengan cara dekarbonisasi lebih cepat."

Selain itu, instrumen-instrumen ekonomi yang dapat membantu pengembangan EBT di Indonesia juga dibahas di dalam pemberitaan ini. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Deni mengatakan, saat ini sudah tersedia berbagai macam instrumen pengurangan risiko pendanaan energi terbarukan untuk Indonesia. Instrumen itu di antaranya adalah penyediaan jaminan, green bond alias sukuk hijau, dan pinjaman lunak."

Permasalahan regulasi atau kebijakan pemerintah ditunjukkan melalui beberapa tulisan yang membahas soal Indonesia memerlukan regulasi yang jelas dalam hal investasi EBT dan jaminan bagi para investor di bidang EBT. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Namun, menurut Deni, instrumen pengurangan risiko ini perlu didukung dengan kebijakan dan regulasi yang dapat mengurangi risiko investasi energi terbarukan. Salah satu kebijakan dan regulasi yang mendukung adalah penetapan target energi terbarukan yang jelas."

Penetapan target energi terbarukan yang jelas juga merupakan salah satu bukti jika permasalahan regulasi diangkat di dalam berita ini. Tulisan di atas sudah menunjukkan hal tersebut.

2) *Diagnose Causes*

Penyebab utama dari munculnya permasalahan ekonomi dan permasalahan regulasi adalah kebijakan pemerintah yang kurang mengakomodir kebutuhan dalam sektor EBT dan penetapan target yang tidak konsisten oleh pemerintah. Pengembangan EBT memerlukan kebijakan dari pemerintah, tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Namun, menurut Deni, instrumen pengurangan risiko ini perlu didukung dengan kebijakan dan regulasi yang dapat mengurangi risiko investasi energi terbarukan."

Apabila kebijakan-kebijakan yang ada belum bisa mengakomodir hal tersebut, maka pengembang EBT akan kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap pembiayaan untuk pengembangan EBT. Tulisan lain yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Deni menambahkan, Indonesia perlu memperhatikan dukungan teknis pembangunan energi terbarukan yang terintegrasi, menciptakan iklim perizinan yang mendukung proyek skala kecil, dan meningkatkan kredibilitas proyek energi terbarukan."

Penetapan target dari pemerintahpun masih belum konsisten. Penetapan target yang tidak konsisten tersebut menyebabkan adanya kebingungan dalam proses pengembangan EBT. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Selama ini masih ada banyak perbedaan target penurunan emisi di dalam pemerintah. Jika ada konsistensi dalam target, maka kerja sama antara seluruh pemangku kebijakan akan lebih mudah dijalankan."

Jika ada kebijakan yang mendukung dan berpihak kepada pengembangan EBT, mungkin permasalahan tidak akan muncul.

3) *Make Moral Judgement*

Kebijakan yang ada di Indonesia masih dinilai tidak memihak kepada pengembangan EBT. Kebijakan-kebijakan energi di Indonesia masih merupakan kebijakan yang mengepentingkan energi fosil dibanding dengan pengembangan energi baru terbarukan. Faisal Basri adalah orang yang ditulis oleh Kompas.com mengatakan hal tersebut. Tulisan yang menunjukkannya adalah sebagai berikut:

"Menurut Faisal, kenyataannya selama ini, kebijakan pemerintah belum berpihak pada energi terbarukan. Hal tersebut tercermin dari APBN yang masih memberi subsidi ratusan triliun rupiah untuk energi fosil."

Alokasi APBN ratusan triliun rupiah untuk energi fosil juga merupakan bukti jika pemerintah masih fokus kepada pemanfaatan energi fosil dibanding dengan pengembangan EBT.

4) *Treatment Recommendation*

Membuat target yang konsisten dan mengedepankan kebijakan yang nyata untuk pengembangan energi baru terbarukan adalah dua rekomendasi yang dituliskan di Kompas.com. Target yang konsisten diperlukan untuk mempermudah koordinasi maupun kerjasama antar lembaga dan instansi terkait. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Selama ini masih ada banyak perbedaan target penurunan emisi di dalam pemerintah. Jika ada konsistensi dalam target, maka kerja sama antara seluruh pemangku kebijakan akan lebih mudah dijalankan."

Selain itu, untuk mewujudkan dan mencapai target-target yang telah dibuat oleh pemerintah, diperlukan tindakan nyata oleh pemerintah untuk bisa mendukung adanya perkembangan di dalam EBT. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Faisal berpendapat pemerintah, perlu mengedepankan kebijakan yang nyata untuk mendukung riset energi terbarukan dan memastikan perkembangan industri energi terbarukan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen."

Jika ada kebijakan dan dukungan yang nyata dari pemerintah, terutama dalam hal riset energi terbarukan, maka diyakini Indonesia bisa menjadi salah satu produsen energi bersih di dunia. Tidak hanya menjadi konsumen energi saja.

j. Judul Berita: Energi Terbarukan dan Target Indonesia

Terbit: 11 November 2021

Tabel 4.10

Analisis Framing Model Robert N. Entman “Energi Terbarukan dan Target Indonesia”

<i>Define Problem</i>	Masalah Manajerial dan Masalah Hukum oleh pemerintah
<i>Diagnose Causes</i>	1) Pengembangan bauran EBT masih jauh dari target. 2) Belum ada payung hukum yang kuat terkait dengan pengembangan EBT di Indonesia.
<i>Make Moral Judgement</i>	Potensi EBT di Indonesia sangat besar, namun pemanfaatannya masih jauh dari target.
<i>Treatment Recommendation</i>	1. Membuat payung hukum pengembangan EBT. 2. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan EBT.

1) Define Problem

Masalah manajerial dan masalah hukum adalah dua masalah utama yang dibahas di dalam tulisan oleh Kompas.com. Kurangnya pemanfaatan EBT di Indonesia dan kurangnya perkembangan pembangkit EBT menunjukkan bagaimana pengelolaan EBT di Indonesia masih belum bagus. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Namun target hanya tinggal target. Ibarat jauh panggang dari api. Hingga 2020, realisasi kapasitas pembangkit EBT baru 10.467 megawatt, naik dari 2019 sebesar 10.291 MW."

Selanjutnya, Kompas.com juga menuliskan secara gamblang jika pemerintah terlihat kesulitan dalam proses pengembangan EBT. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Lalu apakah penyebab pemerintah terlihat tergepoh-gepoh dalam mengejar target pembangkit EBT ini? Salah satunya adalah kebijakan pemerintah."

Kata-kata salah satunya adalah kebijakan pemerintah, menunjukkan bagaimana masalah regulasi juga merupakan permasalahan utama yang dibahas di dalam berita ini. Investor dan para pengembang EBT di Indonesia menginginkan adanya payung hukum yang jelas. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"investor menginginkan adanya payung hukum sebagai dasar tata kelola pengembangan EBT yang lebih mengikat. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah masalah harga listrik EBT yang dinilai masih kurang kompetitif dan ekonomis dalam pengembangan pembangkit EBT."

Tulisan di atas menunjukkan bagaimana Kompas.com membingkai permasalahan regulasi sebagai masalah yang perlu untuk diatasi guna mempercepat lajut pengembangan EBT.

2) *Diagnose Causes*

Pengembangan bauran EBT masih jauh dari target dan belum ada payung hukum yang kuat terkait dengan pengembangan EBT di Indonesia merupakan dua penyebab utama dari munculnya masalah pengelolaan dan masalah regulasi dalam berita ini. Potensi EBT di Indonesia sangatlah besar. Terutama dalam hal tenaga surya, meski begitu pengembangan dan pemanfaatannya masih sangat sedikit di Indonesia. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki potensi EBT yang mencapai 400.000 Mega Watt (MW) pada 2021. Jika diasumsikan daya terpasang satu rumah sebesar 450 volt ampere (VA), maka kapasitas EBT yang dimiliki negara ini mampu mengaliri listrik kurang lebih 800 juta rumah penduduk."

Tulisan lain yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Namun target hanya tinggal target. Ibarat jauh panggang dari api. Hingga 2020, realisasi kapasitas pembangkit EBT baru 10.467 megawatt, naik dari 2019 sebesar 10.291 MW."

Pemerintah dianggap belum bisa mencapai target bauran energi 23% pada tahun 2025. Hal yang turut menyebabkan sulit tercapainya target adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dinilai tidak berpihak kepada pengembangan energi baru terbarukan dan masih terlalu fokus kepada pengelolaan energi fosil. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Investor menginginkan adanya payung hukum sebagai dasar tata kelola pengembangan EBT yang lebih mengikat. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah masalah harga listrik EBT yang dinilai masih kurang kompetitif dan ekonomis dalam pengembangan pembangkit EBT. Berdasarkan perhitungan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), harga jual listrik dari pembangkit EBT saat ini mencapai 5-6 sen dollar AS per kilo Watt hour (kWh), jauh lebih mahal daripada harga jual listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang hanya 3 sen dollar AS. Perbedaan yang signifikan ini tentu menjadi hambatan dalam merangsang investor untuk membangun proyek-proyek pembangkit EBT."

3) Make Moral Judgement

Potensi EBT di Indonesia sangat besar, namun pemanfaatannya masih jauh dari target merupakan penilaian moral yang secara konsisten ditunjukkan di dalam berita ini. Hal tersebut dikarenakan ada kesan ironi yang muncul. Ketika potensi EBT dapat mengaliri listrik untuk 800 juta rumah penduduk, tapi pemanfaatannya masih sangat sedikit. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki potensi EBT yang mencapai 400.000 Mega Watt (MW) pada 2021. Jika diasumsikan daya terpasang satu rumah sebesar 450 volt ampere (VA), maka kapasitas EBT yang dimiliki negara ini mampu mengaliri listrik kurang lebih 800 juta rumah penduduk."

Pemerintah memang menetapkan target-target terkait pengembangan EBT. Akan tetapi, target tersebut kurang dimaksimalkan sehingga memberikan kesan jika target yang dibuat hanya berupa formalitas saja. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Namun target hanya tinggal target. Ibarat jauh panggang dari api. Hingga 2020, realisasi kapasitas pembangkit EBT baru 10.467 megawatt, naik dari 2019 sebesar 10.291 MW."

4) Treatment Recommendation

Membuat payung hukum pengembangan EBT dan menambah komitmen pemerintah dalam pengembangan EBT adalah rekomendasi yang diberikan oleh Kompas.com. Payung hukum perlu dibuat untuk memberi kepastian kepada para investor maupun pihak pengembang EBT. Tanpa payung hukum yang sesuai, dikhawatirkan, proses pengembangan EBT akan memiliki banyak resiko. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Investor menginginkan adanya payung hukum sebagai dasar tata kelola pengembangan EBT yang lebih mengikat. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah masalah harga listrik EBT yang dinilai masih kurang kompetitif dan ekonomis dalam pengembangan pembangkit EBT."

Selain itu, untuk memastikan target-target yang ada dapat tercapai, maka diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Untuk memastikan target bauran energi nasional itu dapat dicapai, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, baik Presiden maupun antarkementerian. Kementerian ESDM diharapkan dapat memberikan usulan kepada Presiden mengenai skema tarif listrik yang kompetitif dan berkeadilan, baik bagi investor dan konsumen, yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden Tarif EBT. "

Tanpa adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, Kompas.com melihat jika target bauran energi terbarukan 23% di tahun 2025 hanya akan menjadi angan.

2. Analisis Pemberitaan Isu Energi Baru Terbarukan pada Portal Berita Tempo.co

a. Judul Berita: Wapres Minta Energi Fosil Digantikan dengan Energi Baru Terbarukan

Terbit: 1 Februari 2021

Tabel 4.11

Analisis Framing Model Robert N. Entman “Wapres Minta Energi Fosil Digantikan dengan Energi Baru Terbarukan”

<i>Define Problem</i>	Masalah Ekonomi di masyarakat dan pemerintah.
<i>Diagnose Causes</i>	Ketergantungan terhadap energi fosil yang diimpor dari luar negeri.
<i>Make Moral Judgement</i>	Contoh ketergantungan adalah LPG, 70% LPG rumah tangga adalah impor dari luar negeri.
<i>Treatment Recommendation</i>	Mengganti secara bertahap energi impor dengan energi baru terbarukan yang tersedia secara lokal.

1) *Define Problem*

Permasalahan ekonomi yang muncul baik di masyarakat maupun di pemerintah merupakan hal yang dibahas di dalam berita ini. Permasalahan ekonomi di masyarakat muncul dibuktikan dengan adanya tulisan yang mengatakan jika sumber energi yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat, bahan bakunya 70% impor. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kita juga harus menyadari bahwa saat ini kita masih sangat tergantung pada energi fosil yang sebagian besar justru diimpor. Saya ingin memberikan contoh, sumber energi utama yang digunakan untuk memasak oleh sebagian besar rumah tangga di Indonesia yakni LPG, lebih dari 70 persen diimpor."

Pernyataan Ma'ruf Amin tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat kita masih bergantung dengan energi yang diimpor dari luar negeri. Permasalahan

impor tersebut juga merupakan masalah ekonomi bagi pemerintah. Karena pemerintah adalah pihak yang mengizinkan adanya impor ke Indonesia. Tulisan pendukung yang sesuai dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil harus segera dihentikan dan diganti dengan energi baru terbarukan yang dimiliki di dalam negeri. "

Fokus dari berita ini adalah menghentikan impor dan memaksimalkan energi baru terbarukan yang tersedia secara lokal di Indonesia.

2) Diagnose Causes

Ketergantungan terhadap energi fosil yang diimpor dari luar negeri adalah penyebab dari masalah ekonomi yang muncul dalam berita oleh Tempo.co ini. Apabila Indonesia sudah bergantung kepada energi baru terbarukan yang tersedia secara lokal, maka impor bisa dikurangi. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil harus segera dihentikan dan diganti dengan energi baru terbarukan yang dimiliki di dalam negeri. "

Itulah mengapa Ma'ruf Amin terus menerus mengatakan untuk melakukan pengembangan energi baru terbarukan dalam negeri, sehingga Indonesia dan masyarakat Indonesia tidak perlu lagi bergantung kepada energi fosil yang diimpor dari luar negeri.

3) Make Moral Judgement

Contoh kasus yang menunjukkan adanya ketergantungan dengan energi fosil yang diimpor dari luar negeri adalah ketergantungan LPG. Sebanyak 70% LPG rumah tangga adalah impor dari luar negeri. Hal tersebut menunjukkan jika sudah saatnya Indonesia beralih menuju energi baru terbarukan yang tersedia secara lokal. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil harus segera dihentikan dan diganti dengan energi baru terbarukan yang dimiliki di dalam negeri. "

Kata-kata “diganti dengan energi baru terbarukan yang dimiliki di dalam negeri” terus menerus diulang. Menunjukkan bagaimana Tempo.co ingin mendorong pemerintah untuk beralih dari energi fosil yang diimpor, menuju energi baru terbarukan yang sudah tersedia di dalam negeri.

4) *Treatment Recommendation*

Rekomendasi penyelesaian yang ditawarkan oleh Tempo.co adalah mengganti secara bertahap energi impor dengan energi baru terbarukan yang tersedia secara lokal. Kata “mengganti secara bertahap” menunjukkan jika pemerintah masih memerlukan waktu untuk mengganti sumber energi utama di Indonesia. Tidak dijelaskan mengapa Indonesia perlu waktu untuk beralih menuju energi baru terbarukan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil harus segera dihentikan dan diganti dengan energi baru terbarukan yang dimiliki di dalam negeri.”

Meski begitu, sekalipun perlu tahapan dan perlu waktu untuk beralih menuju energi baru terbarukan, Indonesia tetap perlu untuk beralih menuju energi baru terbarukan yang tersedia secara lokal. Dengan begitu, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang diimpor dari luar negeri dapat berkurang dan Indonesia bisa mandiri energi.

b. Judul Berita: Jokowi Minta Dewan Energi Nasional Percepat Bauran Energi Baru Terbarukan

Terbit: 20 April 2021

Tabel 4.12

Analisis Framing Model Robert N. Entman “Jokowi Minta Dewan Energi Nasional Percepat Bauran Energi Baru Terbarukan”

<i>Define Problem</i>	Masalah Lingkungan dan Masalah Ekonomi
-----------------------	---

	oleh pemerintah
<i>Diagnose Causes</i>	1) EBT akan membantu mengurangi emisi karbon. 2) EBT akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dan LPG.
<i>Make Moral Judgement</i>	EBT dinilai makin ekonomis dari hari ke hari.
<i>Treatment Recommendation</i>	1) Meningkatkan pemanfaatan PLTS. 2) Memanfaatkan momentum pandemi untuk mengembangkan ekonomi hijau.

1) *Define Problem*

Permasalahan yang muncul dalam berita ini adalah masalah lingkungan dan masalah ekonomi. Permasalahan lingkungan ditunjukkan dengan permintaan presiden Jokowi kepada Dewan Energi Nasional untuk mempercepat peralihan menuju EBT. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Dewan Energi Nasional (DEN) mempercepat bauran energi baru terbarukan atau EBT untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius. Pemerintah menargetkan bauran EBT pada 2025 mencapai 23 persen atau 24 ribu Megawatt. "Agar bisa mendukung target-target pengurangan temperatur sesuai dengan Paris Agreement," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif sesuai rapat sidang paripurna DEN dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa, 20 April 2021."

Tulisan di atas menunjukkan jika berita oleh Tempo.co ini ingin mengangkat tentang isu lingkungan yang ada dan melihat peralihan menuju energi baru terbarukan sebagai salah satu solusi untuk masalah lingkungan tersebut. Selanjutnya, permasalahan ekonomi juga muncul karena Tempo.co menuliskan jika pemerintah berharap dengan peralihan menuju EBT, pemerintah dapat mengurangi laju impor energi. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Arifin mengatakan pemanfaatan EBT akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Pemerintah menetapkan, pada 2030, Indonesia berhasil menekan laju impor energi."

Keinginan pemerintah untuk menekan laju impor energi menunjukkan bagaimana permasalahan ekonomi muncul di dalam berita ini.

2) *Diagnose Causes*

Pendapat jika EBT akan membantu mengurangi emisi karbon adalah penyebab dari munculnya isu lingkungan di dalam berita ini. Selain itu, EBT akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dan LPG adalah penyebab dari munculnya isu ekonomi di dalam berita. Dengan beralih menuju energi baru terbarukan, maka diharapkan emisi karbon di Indonesia dapat menurun dan hal tersebut juga sesuai dengan isi dari perjanjian Paris. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Dewan Energi Nasional (DEN) mempercepat bauran energi baru terbarukan atau EBT untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius. Pemerintah menargetkan bauran EBT pada 2025 mencapai 23 persen atau 24 ribu Megawatt. "Agar bisa mendukung target-target pengurangan temperatur sesuai dengan Paris Agreement," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif sesuai rapat sidang paripurna DEN dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa, 20 April 2021."

Selanjutnya, peralihan dari energi fosil menuju energi baru terbarukan dapat membantu pemerintah menahan laju impor energi merupakan penyebab dari munculnya isu ekonomi di dalam berita ini. Pemerintah berharap dengan adanya peralihan energi ini, maka perputaran uang keluar Indonesia dapat ditahan juga. Sehingga perputaran uang dapat lebih menguntungkan warga masyarakat Indonesia. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Arifin mengatakan pemanfaatan EBT akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Pemerintah menetapkan, pada 2030, Indonesia berhasil menekan laju impor energi."

3) *Make Moral Judgement*

EBT dinilai semakin hari memiliki nilai yang lebih ekonomis. Artinya adalah, dengan beralih menuju EBT, maka Indonesia dapat melakukan

penghematan. Contohnya adalah EBT tenaga surya. Pembangkit Listrik Tenaga Surya akan menjadi semakin ekonomis dari hari ke hari. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Percepatan capaian EBT akan dilakukan dengan peningkatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya yang diklaim makin ekonomis dari hari ke hari."

Hal tersebut menunjukkan jika EBT merupakan hal yang positif, karena nilainya yang semakin ekonomis dan dengan begitu, menurut-sertakan pengembangan EBT dalam upaya elektrifikasi 100% oleh pemerintah merupakan hal yang baik.

4) *Treatment Recommendation*

Tempo.co menyarankan meningkatkan pemanfaatan PLTS serta memanfaatkan momentum pandemi untuk mengembangkan ekonomi hijau sebagai solusi rekomendasi penyelesaian dari masalah yang ada. Melalui 2 solusi tersebut, diharapkan EBT dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Jika EBT berkembang, maka permasalahan lingkungan yaitu pemanasan global dan permasalahan ekonomi yaitu impor energi fosil dapat teratasi. Tulisan yang menunjukkan jika meningkatkan pemanfaatan PLTS merupakan solusi yang ditawarkan oleh Tempo.co adalah sebagai berikut:

"Percepatan capaian EBT akan dilakukan dengan peningkatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya yang diklaim makin ekonomis dari hari ke hari."

Selanjutnya, momentum pandemi adalah momentum yang bagus untuk mengembangkan ekonomi hijau. Ekonomi hijau sendiri dijelaskan sebagai proses ekonomi yang memperdulikan lingkungan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Selain mempercepat EBT, Jokowi meminta DEN memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. "Semua negara maju sudah mengarah ke green economy dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Ini harus disusun strategi yang orientasinya visioner," kata Arifin. Selanjutnya, Jokowi juga meminta adanya penyesuaian rencana umum energi nasional atau RUEN."

Dengan menyusun strategi pertumbuhan ekonomi hijau, maka masalah ekonomi maupun masalah lingkungan dapat diselesaikan.

c. Judul Berita: Luhut Sebut Pemerintah Akan Bertahap Pensiunkan Pembangkit Listrik Batu Bara

Terbit: 27 Mei 2021

Tabel 4.13

Analisis Framing Model Robert N. Entman “Luhut Sebut Pemerintah Akan Bertahap Pensiunkan Pembangkit Listrik Batu Bara”

<i>Define Problem</i>	Masalah Manajerial pengelolaan pembangkit listrik oleh pemerintah.
<i>Diagnose Causes</i>	1) Pemerintah akan menutup pembangkit listrik batu bara dan fokus mengembangkan energi baru terbarukan. 2) Tidak ada lembaga keuangan dunia yang mau memberi bantuan dana untuk pembangkit listrik tenaga fosil.
<i>Make Moral Judgement</i>	1) Energi fosil memicu pemanasan global. 2) Energi fosil sudah menjadi musuh bersama. 3) Pembangkit fosil tidak ramah lingkungan.
<i>Treatment Recommendation</i>	1) Secara bertahap menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga batu bara. 2) Membangun proyek kawasan industri hijau terintegrasi.

1) *Define Problem*

Berita oleh Tempo.co ini berisikan rencana pemerintah untuk secara bertahap menghentikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga batu bara. Penghentian tersebut dengan tujuan untuk memulai proses transisi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Hal tersebut menunjukkan jika pengelolaan energi

di Indonesia akan beralih dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah Indonesia secara bertahap menghentikan penggunaan operasional pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Sebagai gantinya, pemerintah bakal berfokus mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Luhut menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar di bidang energi terbarukan karena kini energi fosil sudah menjadi musuh bersama. "Secara bertahap pemerintah Indonesia juga akan memensiunkan powerplant batu bara," katanya dalam gelaran Indonesia Investment Forum (IIF) 2021 yang digelar KBRI London secara online pada hari ini, Kamis, 27 Mei 2021."

Melalui peralihan tersebut, Indonesia akan berkomitmen untuk menghentikan pengoperasian PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Salah satu rencana pemerintah dalam proses peralihan energi adalah melalui pembangunan kawasan industri hijau. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Upaya pemerintah menggarap energi baru dan terbarukan itu, kata Luhut, salah satunya dilakukan melalui proyek kawasan industri hijau terintegrasi berbasis hydropower yang akan dibangun di Kalimantan Utara. Kawasan industri itu memiliki luasan 12.500 hektare dan termasuk salah satu kawasan industri hijau terbesar di dunia."

Tempo.co menuliskan tentang pembangunan kawasan industri hijau yang berbasis energi angin merupakan salah satu bukti jika masalah pengelolaan dan manajemen energi merupakan masalah utama yang diangkat di dalam berita ini.

2) Diagnose Causes

Ada dua penyebab utama dari munculnya masalah manajemen dalam berita ini. Pertama adalah adanya rencana pemerintah untuk menutup pembangkit listrik batu bara dan fokus mengembangkan energi baru terbarukan. Kedua adalah tidak ada lembaga keuangan dunia yang mau memberi bantuan dana untuk pembangkit listrik tenaga fosil.

Langkah pemerintah untuk menutup PLTU merupakan bukti dan langkah nyata pemerintah dalam rencana peralihan energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah Indonesia secara bertahap menghentikan penggunaan operasional pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Sebagai gantinya, pemerintah bakal berfokus mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)."

Selain itu, saat ini, sudah semakin sedikit dan bahkan sudah tidak adalagi lembaga keuangan dunia yang mau memberi bantuan dana untuk pembangkit listrik tenaga fosil. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Apalagi, kata dia, kini tidak ada lagi lembaga keuangan dunia yang mau mendanai pengembangan pembangkit fosil yang tidak ramah lingkungan itu. "Perbankan internasional pun tidak mau mendanai energi fosil," tutur Luhut. Lebih jauh, Luhut memaparkan, salah satu alasan energi fosil sudah tak lagi dilirik karena penggunaannya terus memicu pemanasan global. "Pemanasan global yang sekarang membuat bumi ini makin panas. Kalau sampai naik 1,5 derajat (celsius), itu akan punya dampak yang tidak bagus."

Kedua hal tersebut adalah alasan mengapa permasalahan manajerial yang muncul di dalam berita ini.

3) Make Moral Judgement

Pembangkit tenaga fosil maupun energi fosil dinilai dengan sangat negatif di dalam berita ini. Narasi-narasi seperti energi fosil memicu pemanasan global, energi fosil sudah menjadi musuh bersama dan pembangkit tenaga fosil menjadi tidak ramah lingkungan terus menerus muncul di dalam berita. Tulisan yang menunjukkan jika energi fosil memicu pemanasan global adalah sebagai berikut:

"Lebih jauh, Luhut memaparkan, salah satu alasan energi fosil sudah tak lagi dilirik karena penggunaannya terus memicu pemanasan global. "Pemanasan global yang sekarang membuat bumi ini makin panas. Kalau sampai naik 1,5 derajat (celsius), itu akan punya dampak yang tidak bagus."

Kedua, energi fosil dibingkai sebagai energi yang sudah menjadi musuh bersama. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Luhut menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar di bidang energi terbarukan karena kini energi fosil sudah menjadi musuh bersama."

Ketiga hal terakhir yang menunjukkan citra energi fosil sebagai hal yang negatif adalah kata-kata energi fosil tidak ramah lingkungan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Apalagi, kata dia, kini tidak ada lagi lembaga keuangan dunia yang mau mendanai pengembangan pembangkit fosil yang tidak ramah lingkungan itu."

4) Treatment Recommendation

Rekomendasi penyelesaian yang diberikan di dalam berita ini adalah secara bertahap menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga batu bara dan membangun proyek kawasan industri hijau terintegrasi. Penghentian operasional PLTU bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor EBT, sehingga menutup PLTU yang memanfaatkan energi fosil merupakan langkah yang tepat. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Luhut menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar di bidang energi terbarukan karena kini energi fosil sudah menjadi musuh bersama. "Secara bertahap pemerintah Indonesia juga akan memensiunkan powerplant batu bara," katanya dalam gelaran Indonesia Investment Forum (IIF) 2021 yang digelar KBRI London secara online pada hari ini, Kamis, 27 Mei 2021."

Tidak hanya sekedar menghentikan operasional PLTU, pemerintah juga akan membangun pembangkit-pembangkit EBT lain guna terus memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satu langkah nyata yang akan dilakukan pemerintah adalah membangun kawasan industri hijau terintegrasi. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Upaya pemerintah menggarap energi baru dan terbarukan itu, kata Luhut, salah satunya dilakukan melalui proyek kawasan industri hijau terintegrasi berbasis hydropower yang akan dibangun di

Kalimantan Utara. Kawasan industri itu memiliki luasan 12.500 hektare dan termasuk salah satu kawasan industri hijau terbesar di dunia.”

Melalui dua rencana tersebut, diharapkan pembangkit EBT di Indonesia dapat berkembang dan dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi karbon.

d. Judul Berita: Realisasi Bauran Energi Baru Terbarukan Capai 13,55 Persen, Naik 2,04 Persen

Terbit: 4 Juni 2021

Tabel 4.14

Analisis Framing Model Robert N. Entman “Realisasi Bauran Energi Baru Terbarukan Capai 13,55 Persen, Naik 2,04 Persen”

<i>Define Problem</i>	Masalah Manajerial pengelolaan pembangkit EBT oleh pemerintah.
<i>Diagnose Causes</i>	Adanya pembangkit listrik baru yang datang dari pembangkit EBT.
<i>Make Moral Judgement</i>	1) Kenaikan dalam waktu 4 bulan adalah hal yang bagus. 2) Kenaikan realisasi masih jauh dari target 23% bauran energi pada tahun 2025. 3) Realisasi yang jauh dari target adalah masalah bersama.
<i>Treatment Recommendation</i>	Pembangunan PLTS sebagai prioritas utama pengembangan EBT.

1) Define Problem

Berita di Tempo.co yang berjudul “Realisasi Bauran Energi Baru Terbarukan Capai 13,55 Persen, Naik 2,04 Persen” merupakan berita yang mengangkat masalah pengelolaan atau masalah manajerial energi baru terbarukan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Berita ini diawali dengan penjabaran

Tempo.co yang menuliskan klaim kementerian ESDM yang mengatakan jika realisasi bauran EBT telah mencapai angka 13,55% pada April 2021. Angka tersebut naik sekitar 2,04% bila dibandingkan dengan angka bauran energi pada akhir Desember 2020. Kenaikan angka bauran EBT tersebut menunjukkan jika pemerintah melakukan pengembangan dalam proses pengelolaan EBT di Indonesia. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengklaim realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) telah mencapai 13,55 persen per April 2021, meningkat 2,04 persen dalam waktu empat bulan dibandingkan data akhir tahun lalu yang baru 11,51 persen.”

Setelah itu, Tempo.co juga memperlihatkan pembangkit listrik EBT baru apa saja yang turut membantu meningkatnya angka bauran EBT. Pembangkit listrik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Pembangkit listrik yang datang dari energi baru dan terbarukan yaitu panas bumi 5,6 persen, air 7,9 persen, dan EBT lainnya 0,33 persen. Kalau dijumlahkan hitungan saya itu 13,55 persen,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021.”

Penjelasan tersebut menunjukkan jika pemerintah melakukan fungsi manajemen energi baru terbarukan di Indonesia.

2) *Diagnose Causes*

Pembangkit listrik EBT baru yang mengisi jajaran pembangkit listrik di Indonesia menunjukkan bagaimana pengelolaan EBT di Indonesia mengalami kemajuan. Sekalipun sebagian besar energi di Indonesia masih mengandalkan pembangkit yang bertenagakan energi fosil, namun pencapaian ini adalah hal yang cukup baik. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan kondisi penyediaan infrastruktur tenaga listrik nasional, Indonesia tercatat memiliki energi berkapasitas 72.888 megawatt yang didominasi 86,45 persennya adalah energi fosil. Dari sisi bauran EBT yang hanya 13,55 persen tersebut, pembangkit listrik tenaga air mempunyai porsi paling besar mencapai 6.144 megawatt, panas bumi 2.131 megawatt, dan energi bersih lainnya sebanyak 2.215 megawatt.”

Meski begitu, pencapaian ini masih jauh dari target pemerintah yang mencanangkan target 23% bauran energi terbarukan di tahun 2025. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Indonesia memiliki komitmen pencapaian bauran energi bersih sebesar 23 persen dengan menargetkan kapasitas terpasang listrik ramah lingkungan dapat mencapai 24.000 megawatt pada 2025.”Ini masih jauh dari target 23 persen yang menjadi tantangan kita untuk dihadapi bersama,” kata Rida.”

3) *Make Moral Judgement*

Kenaikan dalam waktu 4 bulan adalah hal yang bagus, kenaikan realisasi masih jauh dari target 23% bauran energi pada tahun 2025 dan realisasi yang jauh dari target adalah masalah bersama adalah tiga penilaian utama yang muncul di dalam berita ini. Dalam waktu 4 bulan, Indonesia dapat meningkatkan bauran energi baru terbarukan sebesar 2,04% merupakan pencapaian yang cukup bagus, Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengklaim realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) telah mencapai 13,55 persen per April 2021, meningkat 2,04 persen dalam waktu empat bulan dibandingkan data akhir tahun lalu yang baru 11,51 persen. “Pembangkit listrik yang datang dari energi baru dan terbarukan yaitu panas bumi 5,6 persen, air 7,9 persen, dan EBT lainnya 0,33 persen. Kalau dijumlahkan hitungan saya itu 13,55 persen,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021.”

Meski begitu, capaian tersebut masih belum cukup untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Ini masih jauh dari target 23 persen yang menjadi tantangan kita untuk dihadapi bersama,” kata Rida.”

Dalam tulisan di atas, Tempo.co juga menuliskan jika permasalahan masih jauhnya capaian bauran energi dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan permasalahan bersama dan bukan hanya masalah dari pemerintah (dalam hal ini kementerian ESDM) saja.

4) *Treatment Recommendation*

Pembangunan PLTS sebagai prioritas utama pengembangan EBT merupakan rekomendasi solusi yang dituliskan oleh Tempo.co. Melalui pembangunan PLTS, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan bauran energinya hingga dapat mencapai target yang telah ada karena energi surya di Indonesia sangat melimpah dan sangat mungkin untuk dimanfaatkan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Dalam upaya mendorong percepatan bauran energi baru dan terbarukan, pemerintah menyiapkan berbagai strategi salah satunya menempatkan matahari sebagai tulang punggung penghasil listrik ramah lingkungan. Proyek pengembangan energi surya mulai dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar di lahan bekas tambang, lahan tidak produktif, pemanfaatan waduk untuk PLTS terapung, pengembangan PLTS atap rumah, hingga inisiasi konversi PLTU ke PLTS.”

Tulisan di atas juga menunjukkan jika proyek PLTS merupakan solusi yang masuk akal dan menguntungkan bagi Indonesia. Membangun PLTS di atas lahan bekas tambang dapat mengalihfungsikan lahan kosong yang tidak bisa terpakai tersebut menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang ramah lingkungan. Selain itu, pengembangan PLTS atap rumah juga merupakan solusi mikro untuk keperluan listrik perorangan.

e. Judul Berita: Pakar Sebut Energi Terbarukan Lebih Menguntungkan dari Sisi Ekonomi

Terbit: 11 Juni 2021

Tabel 4.15

Analisis Framing Model Robert N. Entman “Pakar Sebut Energi Terbarukan Lebih Menguntungkan dari Sisi Ekonomi”

<i>Define Problem</i>	Masalah Ekonomi dari sisi Energi Baru Terbarukan.
-----------------------	--

<i>Diagnose Causes</i>	1) Investasi baru dalam proyek energi fosil akan terhenti, karena tidak sesuai dengan kesepakatan Paris. 2) Energi baru terbarukan lebih ekonomis.
<i>Make Moral Judgement</i>	Riset menunjukkan jika pengembangan energi fosil baru tidak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi negara-negara di dunia.
<i>Treatment Recommendation</i>	1) Pemerintah menyiapkan strategi dengan menempatkan PLTS sebagai tulang punggung EBT nasional. 2) Mensegerakan proses peralihan dari energi fosil menuju energi baru terbarukan.

1) *Define Problem*

Permasalahan utama yang diangkat di dalam berita ini adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi ditunjukkan melalui banyaknya pembahasan mengenai investasi di dalam berita. Judul beritapun sudah sangat jelas menandakan adanya permasalahan ekonomi yang dibahas di dalam berita ini. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Pakar dan Direktur Riset dari University of Technology Sydney, Sven Taske menyatakan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, energi terbarukan lebih menguntungkan dari sisi ekonomi dibandingkan bahan bakar fosil.”

Tulisan di atas juga menunjukkan bagaimana energi baru terbarukan dibingkai sebagai energi yang lebih menguntungkan dari sisi ekonomi bila dibandingkan dengan energi fosil. Tempo.co juga menuliskan jika investasi baru dalam bidang energi fosil tidak sesuai dengan kesepakatan Paris dan kemungkinan besar akan dihentikan dan dialihkan untuk energi baru terbarukan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap investasi baru dalam proyek batu bara, minyak dan gas tidak sejalan dengan Kesepakatan Paris dan kemungkinan besar akan terhenti karena dari sisi ekonomi energi terbarukan lebih menguntungkan,

terutama matahari dan angin," kata Sven Taske dalam siaran pers dari Yayasan Indonesia CeraH yang diterima di Jakarta, Jumat. "

Dari kedua tulisan di atas kita sudah dapat mengerti jika Tempo.co membingkai isu energi terbarukan dalam berita ini sebagai suatu masalah ekonomi.

2) Diagnose Causes

Tempo.co menuliskan jika tidak akan ada investasi baru dalam sektor energi fosil. Karena pengembangan energi fosil tidak sesuai dengan kesepakatan Paris dan lebih tidak ramah lingkungan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Setiap investasi baru dalam proyek batu bara, minyak dan gas tidak sejalan dengan Kesepakatan Paris dan kemungkinan besar akan terhenti karena dari sisi ekonomi energi terbarukan lebih menguntungkan, terutama matahari dan angin," kata Sven Taske dalam siaran pers dari Yayasan Indonesia CeraH yang diterima di Jakarta, Jumat. "

Tulisan di atas juga menunjukkan bagaimana energi baru terbarukan lebih menguntungkan dari sisi ekonomi jika dibandingkan dengan energi fosil. Selanjutnya, kombinasi antara energi baru terbarukan, teknologi penyimpanan serta pasokan yang memadai disebut oleh Tempo.co akan mampu menghasilkan pasokan energi yang handal untuk industri. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Menurut dia, kombinasi energi terbarukan, teknologi penyimpanan, dan bahan bakar terbarukan akan menyediakan pasokan energi yang andal untuk industri, sektor pariwisata, serta untuk bangunan. "

Melalui seluruh hal tersebut, dapat dilihat jika berhentinya pengembangan energi fosil dan juga energi baru terbarukan yang dinilai lebih ekonomis merupakan penyebab dari masalah ekonomi yang muncul.

3) Make Moral Judgement

Ada beberapa anggapan yang menyatakan jika energi fosil masih diperlukan, karena kapasitas dari energi baru terbarukan belum tentu dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dunia. Tapi berita dalam Tempo.co ini membingkai jika jumlah potensi energi baru terbarukan sudah cukup untuk memberi pasokan listrik untuk semua orang di seluruh dunia. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Selain itu, riset terbaru menunjukkan bahwa negara-negara di dunia tidak membutuhkan pengembangan bahan bakar fosil baru untuk memenuhi permintaan energi primer. Analisis yang dilakukan The Institute for Sustainable Futures, University of Technology, Sydney, menyebutkan, potensi sumber terbarukan yang ada di seluruh dunia lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dunia selama transisi dan memastikan akses energi 100 persen untuk semua warga.”

Tulisan tersebut menunjukan jika kita tidak perlu khawatir dan mencoba untuk mengeksplorasi sumber energi fosil baru. Alasannya karena potensi dari sumber energi baru terbarukan sudah cukup untuk memastikan akses energi 100% untuk semua orang. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Analisis tersebut menegaskan, bahkan dengan perkiraan konservatif yang memperhitungkan perlindungan lingkungan, kendala lahan, dan kelayakan teknis, energi matahari dan angin dapat memenuhi permintaan energi primer lebih dari 50 kali lipat (berdasarkan permintaan global 2019), yang mengindikasikan bahwa pengembangan bahan bakar fosil baru tak dibutuhkan. “Semua kawasan, termasuk negara produsen bahan bakar fosil teratas di Amerika Utara, Timur Tengah, dan Asia, memiliki lebih dari cukup energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara di setiap kawasan. Penghapusan bahan bakar fosil tidak akan meninggalkan siapa pun dalam kegelapan dan tanpa akses energi,” ucapnya”

Secara konsisten, penelitian yang ditulis oleh Tempo.co ini menunjukkan jika energi-energi terbarukan seperti energi surya, angin, air dan lain sebagainya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dunia. Bahkan kendala yang mungkin terjadipun sudah ikut diperhitungkan.

4) Treatment Recommendation

Rekomendasi yang muncul di dalam berita ini adalah pemerintah menyiapkan strategi dengan menempatkan PLTS sebagai tulang punggung EBT nasional. Potensi tenaga surya di Indonesia sangat besar dan potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memasok sebagian besar kebutuhan energi di Indonesia. Tidak heran jika pemerintah menempatkan PLTS sebagai prioritas utama dalam proses peralihan energi menuju energi baru terbarukan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Proyek pengembangan energi surya mulai dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS skala besar di lahan bekas tambang, lahan tidak produktif, pemanfaatan waduk untuk PLTS terapung, pengembangan PLTS atap rumah, hingga inisiasi konversi PLTU ke PLTS.”

Selain itu, Tempo.co juga mengatakan jika tidak adalagi alasan untuk menunda pengembangan energi baru terbarukan. Kata-kata tersebut mengisyaratkan rekomendasi dari Tempo.co bagi pemerintah agar bersegera melakukan pengembangan dalam energi baru terbarukan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Sementara itu, Direktur Climate Action Network South Asia Sanjay Vashist menuturkan bahwa saat ini tidak ada lagi alasan untuk menunda percepatan penyerapan energi terbarukan dan mengakhiri bahan bakar fosil.”

f. Judul Berita: Dewan Energi Nasional Susun Road Map Skema Transisi Energi

Terbit: 11 Juli 2021

Tabel 4.16

Analisis Framing Model Robert N. Entman “Dewan Energi Nasional Susun Road Map Skema Transisi Energi”

<i>Define Problem</i>	Masalah Manajerial pengelolaan energi oleh pemerintah.
<i>Diagnose Causes</i>	Dewan Energi Nasional sedang menyusun peta jalan energi untuk mengikuti tren global pengurangan energi fosil dan peningkatan

	pemanfaatan EBT.
<i>Make Moral Judgement</i>	1) Pemerintah berkomitmen untuk mengganti pembangkit fosil dengan pembangkit EBT dalam rentang tahun 2025-2045. 2) Peralihan energi fosil menuju EBT tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan aspek ketersediaan energi.
<i>Treatment Recommendation</i>	1) Pemerintah hendak menghentikan PLTU dalam rentang tahun 2025-2045. 2) Segera mengganti pembangkit fosil dengan pembangkit EBT.

1) *Define Problem*

Keseluruhan pemberitaan merupakan ringkasan dari hasil rapat Dewan Energi Nasional yang hendak menyusun peta jalan transisi energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Penyusunan peta jalan transisi tersebut dilakukan untuk mengikuti tren global yang mengedepankan pembangkit EBT daripada pembangkit tenaga fosil. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dewan Energi Nasional (DEN) sedang menyusun peta jalan transisi energi untuk menghadapi tren global mengenai pembangunan energi rendah karbon dan pemanfaatan energi ramah lingkungan. "Penyusunan peta jalan transisi energi merupakan program kerja DEN periode 2021-2025," kata Anggota DEN Satya Widya Yudha dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Minggu 11 Juli 2021."

Dalam proses pembuatan peta jalan nasional transisi, DEN akan merumuskan langkah-langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan target nol emisi karbon yang telah dicanangkan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Selanjutnya pada 2022, peta jalan transisi energi diproyeksikan sudah menjadi dokumen resmi termasuk skenario ambisius nol bersih emisi dan aksi mitigasi sektor energi sebagai bahan rekomendasi DEN. Proposisi kebijakan menuju nol bersih emisi dalam transisi energi

dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan energi nasional pada koridor ketahanan energi berupa ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan serta tidak membebani perekonomian.”

Tulisan yang mengatakan “proposisi kebijakan menuju nol bersih emisi dalam transisi energi dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan energi nasional pada koridor ketahanan energi berupa ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan serta tidak membebani perekonomian” menunjukkan jika pemberitaan oleh Tempo.co ini adalah pemberitaan yang mengangkat permasalahan manajerial sebagai topik utama yang hendak dibahas.

2) *Diagnose Causes*

Alasan mengapa masalah manajerial adalah masalah yang muncul di dalam pemberitaan ini adalah karena Dewan Energi Nasional sedang menyusun peta jalan energi untuk mengikuti tren global pengurangan energi fosil dan peningkatan pemanfaatan EBT. Kegiatan Dewan Energi Nasional dalam menyusun peta jalan transisi merupakan suatu wujud dari kegiatan pengelolaan energi di Indonesia. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Penyusunan peta jalan transisi energi merupakan program kerja DEN periode 2021-2025,” kata Anggota DEN Satya Widya Yudha dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Minggu 11 Juli 2021.”

Tulisan di atas juga menunjukkan jika proses penyusunan peta jalan transisi energi merupakan salah satu program kerja DEN periode 2021-2025. Selain menyusun peta jalan transisi energi, DEN juga menargetkan akan melakukan inventarisasi terhadap segala persiapan untuk mencapai target Indonesia nol emisi karbon. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Tahun ini, DEN menargetkan inventarisasi berbagai aksi mitigasi untuk setiap sektor dan subsektor energi hingga nol bersih emisi yang dapat menjadi bahan komunikasi publik terkait skenario pemerintah dalam penerapan kebijakan transisi energi.”

3) *Make Moral Judgement*

Salah satu bentuk wujud nyata dari peta jalan transisi energi adalah adanya target pemerintah yang hendak mengganti pembangkit energi fosil dengan pembangkit EBT dalam rentang waktu tahun 2025-2045. Komitmen pemerintah untuk mengganti pembangkit fosil dengan pembangkit EBT dalam rentang tahun 2025-2045 menunjukkan jika memang energi fosil sudah habis masanya di Indonesia dan akan segera digantikan dengan energi terbarukan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Sebelumnya diberitakan, pemerintah berkomitmen akan menghentikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara sebanyak 53 gigawatt pada rentang 2025 hingga 2045."

Meski begitu, proses transisi energi akan tetap memperhatikan ketahanan energi nasional. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Proposisi kebijakan menuju nol bersih emisi dalam transisi energi dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan energi nasional pada koridor ketahanan energi berupa ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan serta tidak membebani perekonomian."

Dengan begitu, transisi energi dapat tetap berjalan dan kebutuhan energi di Indonesia dapat tetap terpenuhi.

4) *Treatment Recommendation*

Ada 2 rekomendasi penyelesaian yang ditawarkan oleh Tempo.co, yaitu menghentikan PLTU dalam rentang tahun 2025-2045 dan segera mengganti pembangkit fosil dengan pembangkit EBT. Tempo.co menuliskan jika pemerintah hendak menghentikan operasional PLTU dalam rentang tahun 2025-2045. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Sebelumnya diberitakan, pemerintah berkomitmen akan menghentikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara sebanyak 53 gigawatt pada rentang 2025 hingga 2045."

Komitmen pemerintah tersebut merupakan wujud penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh energi fosil dan merupakan salah satu bentuk pengelolaan

yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, Tempo.co juga menuliskan jika pemerintah harus segera mengganti pembangkit energi fosil dengan pembangkit EBT. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Ketika pembangkit energi fosil padam satu per satunya, maka kekosongan pembangkit akan diganti oleh pembangkit energi terbarukan yang bersumber dari matahari, air, angin, biomassa, hingga panas bumi."

g. Judul Berita: Alasan ESDM Anggap Gas Alam Penting dalam Transisi Energi Fosil ke EBT

Terbit: 10 Oktober 2021

Tabel 4.17

Analisis Framing Model Robert N. Entman "Alasan ESDM Anggap Gas Alam Penting dalam Transisi Energi Fosil ke EBT"

<i>Define Problem</i>	Masalah Manajerial berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mengelola potensi gas alam yang dimiliki.
<i>Diagnose Causes</i>	Gas alam berperan penting dalam program pemerintah, karena mudah disimpan, ditransportasikan dan rendah emisi karbon.
<i>Make Moral Judgement</i>	Peran gas alam sangat penting dalam proses transisi energi di Indonesia, dari energi kotor menuju energi bersih.
<i>Treatment Recommendation</i>	Meningkatkan pembangunan infrastruktur gas untuk menunjang produksi dan pendistribusian gas alam.

1) *Define Problem*

Permasalahan yang ditonjolkan di dalam berita oleh Tempo.co ini adalah masalah pengelolaan sumber energi baru terbarukan berkaitan dengan pemaksimalan potensi gas alam yang dimiliki oleh Indonesia. Pemanfaatan gas alam oleh pemerintah menunjukkan adanya usaha pengelolaan dan manajemen

energi yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Pemerintah menempatkan arah kebijakan peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan dan menjadikan gas sebagai faktor penting dalam program transisi energi ke depan. "Peran gas alam dalam transisi energi menjadi lebih penting karena sifat gas yang mudah ditransportasikan dan disimpan dan yang terpenting adalah faktor emisi karbonnya," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Minggu, 10 Oktober 2021."

Tulisan di atas juga menunjukkan sifat-sifat dari gas alam yang menyebabkan gas alam menjadi salah satu alternatif energi yang penting dalam proses transisi energi di Indonesia. Selain itu, Tempo.co juga menuliskan komitmen pemerintah dalam proses menjaga emisi karbon di Indonesia. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dia menegaskan bahwa Indonesia telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional termasuk teknologi dan keuangan. Sektor energi berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) menjadi 398 juta ton CO₂e pada 2030 melalui pengembangan energi terbarukan, penerapan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih."

Komitmen pemerintah yang dalam berita ini diwujudkan dalam pemanfaatan dan pemaksimalan energi gas alam merupakan bentuk dari masalah manajerial yang Tempo.co tampilkan di dalam berita ini. Diharapkan Indonesia dapat membantu menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pengembangan EBT, penerapan konservasi energi dan juga penerapan teknologi energi bersih.

2) Diagnose Causes

Alasan mengapa pemerintah menganggap gas alam memiliki peran penting di dalam proses transisi energi adalah karena gas alam mudah disimpan, mudah ditransportasikan dan rendah emisi karbon. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pemerintah ingin untuk memaksimalkan pemanfaatan gas alam di Indonesia. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Peran gas alam dalam transisi energi menjadi lebih penting karena sifat gas yang mudah ditransportasikan dan disimpan dan yang terpenting adalah faktor emisi karbonnya."

Sumber energi terbarukan yang lain juga perlu untuk dikembangkan, hanya saja, pengembangan sumber energi terbarukan yang lain memerlukan waktu, sedangkan pembangkit tenaga fosil dan sumber energi fosil lainnya perlu segera dipensiunkan dan dialihkan menuju sumber energi baru terbarukan. Itulah mengapa pengembangan energi yang bersumber dari gas alam penting, karena dengan begitu, slot yang kosong akibat ditutupnya sumber energi fosil dapat terisi dengan segera melalui pengembangan gas alam. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Menurut dia, gas berperan dalam transisi energi karena faktor emisi karbonnya baik di seluruh Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Dia menegaskan bahwa Indonesia telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional termasuk teknologi dan keuangan. Sektor energi berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) menjadi 398 juta ton CO₂e pada 2030 melalui pengembangan energi terbarukan, penerapan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih. Karena itulah, peran gas sebagai energi transisi sangat penting," ujar Tutuka."

Keunggulan-keunggulan tersebut menyebabkan pemerintah ingin untuk memaksimalkan penggunaan gas alam dalam skema transisi energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan.

3) Make Moral Judgement

Di dalam berita ini, secara konsisten dan terus menerus, gas alam dibingkai sebagai suatu solusi yang tepat dalam proses transisi energi. Tempo.co menonjolkan pendapat dari pemerintah jika gas alam memiliki peran yang penting di dalam proses transisi energi. Tulisan-tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Pemerintah menempatkan arah kebijakan peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan dan menjadikan gas sebagai faktor penting dalam program transisi energi ke depan."

Tulisan kedua yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Peran gas alam dalam transisi energi menjadi lebih penting karena sifat gas yang mudah ditransportasikan dan disimpan dan yang terpenting adalah faktor emisi karbonnya."

Tulisan ketiga yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Menurut dia, gas berperan dalam transisi energi karena faktor emisi karbonnya baik di seluruh Asia Pasifik, termasuk Indonesia."

Tulisan keempat yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Karena itulah, peran gas sebagai energi transisi sangat penting."

Dari keempat tulisan di atas, menunjukkan bagaimana Tempo.co membingkai penggunaan gas alam sebagai suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam proses transisi energi di Indonesia.

4) *Treatment Recommendation*

Dalam proses pemaksimalan potensi gas alam yang dimiliki Indonesia, Tempo.co menuliskan suatu rekomendasi, yaitu meningkatkan infrastruktur pendukung untuk energi gas alam serta jalur distribusi yang baik sehingga energi gas alam dapat disalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya industri maupun pembangkit listrik, pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan transmisi pipa gas, antara lain pipa Cirebon-Semarang tie in West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping dan Sei ruas Mangkei-Dumai."

Jika infrastruktur penunjang sudah disiapkan, maka pemaksimalan gas alam sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih optimal. Infrastruktur yang baik juga dapat membantu memaksimalkan penggunaan gas alam di daerah-daerah Indonesia yang terkendala secara geografis. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Selain itu, pengembangan pipa gas alam cair skala kecil dan virtual untuk mengamankan pasokan energi di daerah-daerah yang terkendala faktor geografis, seperti di pulau-pulau kecil terutama yang berlokasi di bagian timur Indonesia."

h. Judul Berita: Pertamina Ingin Genjot Pemanfaatan Panas Bumi sebagai Kunci Energi Terbarukan

Terbit: 8 November 2021

Tabel 4.18

Analisis Framing Model Robert N. Entman "Pertamina Ingin Genjot Pemanfaatan Panas Bumi sebagai Kunci Energi Terbarukan"

<i>Define Problem</i>	Masalah Manajerial pengelolaan dan pengoptimalan energi baru terbarukan di Indonesia oleh pemerintah.
<i>Diagnose Causes</i>	1) Indonesia adalah negara dengan cadangan panas bumi terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika. 2) Panas Bumi dapat menjadi alternatif pasokan energi yang stabil dan tidak terganggu oleh cuaca.
<i>Make Moral Judgement</i>	Panas Bumi memiliki biaya yang kompetitif jika dibandingkan dengan EBT lainnya, sekitar 20-40% lebih efektif.
<i>Treatment Recommendation</i>	Membentuk perusahaan <i>holding</i> panas Bumi di Indonesia.

1) Define Problem

Pemerintah melalui Pertamina ingin untuk memaksimalkan pengelolaan energi panas Bumi di Indonesia sebagai salah satu kunci transisi energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Keinginan Pertamina tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah ingin mengelolan dan memaksimalkan potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"PT Pertamina (Persero) ingin mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi (geothermal) sebagai salah satu kunci energi terbarukan di Indonesia."

Ditambah lagi, Tempo.co juga menuliskan jika pemanfaatan panas bumi sebagai energi baru terbarukan di Indonesia belum banyak. Itulah mengapa, Pertamina ingin untuk menjajaki potensi yang ada dan memaksimalkan potensi panas bumi di Indonesia. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Mengingat pemanfaatan cadangan panas bumi yang masih sangat rendah, Pertamina akan menjajaki peluang besar untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan tersebut. "Ini juga untuk membantu (realisasi) bauran energi Indonesia, yang sejalan dengan strategi energi nasional untuk meningkatkan EBT dari level saat ini di bawah 30 persen menjadi 24 persen pada 2030. Panas bumi akan menjadi kunci untuk itu," tutur Dannif."

Seluruh tulisan di atas menunjukkan jika permasalahan manajerial oleh Pertamina merupakan permasalahan yang muncul di dalam berita ini.

2) Diagnose Causes

Mengapa Pertamina ingin menjadikan energi panas Bumi sebagai prioritas dalam proses transisi energi? Alasannya adalah karena Indonesia adalah negara kedua dengan cadangan panas Bumi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Wajar saja jika pemerintah melalui Pertamina hendak menjadikan energi panas Bumi sebagai salah satu tumpuan dalam proses transisi energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dengan total kapasitas terpasang 2.133 MW, Indonesia merupakan negara dengan potensi panas bumi terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat."

Selain itu, ironisnya, pemanfaatan energi panas Bumi masih sangat kecil, hanya di bawah 10% dari potensi yang ada. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Tetapi pemanfaatan cadangan sumber daya tersebut hanya sekitar kurang dari 10 persen, sehingga sangat potensial untuk meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan energi panas bumi," kata Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia Dannif Danusaputro ketika berbicara dalam talkshow daring yang diselenggarakan Indonesia Pavilion di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Senin, 8 November 2021."

Selain itu, panas Bumi dapat menjadi salah satu alternatif sumber energi yang lebih stabil, karena panas Bumi tidak tergantung dengan cuaca. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Sebagai salah satu sumber energi terbarukan, panas bumi dikenal sebagai satu-satunya EBT yang tidak bersifat intermitten dan dapat dijadikan sebagai base load. Dengan faktor ketersediaan rata-rata 90 persen dan faktor kapasitas 70 persen, panas bumi dapat menjadi pasokan energi yang stabil yang tidak terganggu oleh faktor alam seperti cuaca."

Wajar saja jika pemerintah hendak memaksimalkan energi panas Bumi sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan.

3) Make Moral Judgement

Salah satu penilaian yang mendukung pemanfaatan panas Bumi sebagai sumber energi baru terbarukan adalah biaya yang diperlukan untuk pengembangan panas Bumi terbilang lebih rendah jika dibanding dengan sumber-sumber energi baru terbarukan yang lain. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Panas bumi juga memiliki biaya yang kompetitif dibandingkan dengan sumber EBT lainnya. Biayanya 20-40 persen lebih efektif dibandingkan dengan EBT lainnya, terutama dengan kebutuhan storage yang dibutuhkan untuk tenaga surya atau tenaga angin."

Dengan biaya yang 20-40 % lebih efektif dibanding dengan sumber EBT lainnya maka tidak heran jika pemerintah melalui Pertamina ingin untuk mengembangkan energi panas Bumi sebagai salah satu tumpuan dalam transisi energi fosil menuju energi baru terbarukan.

4) *Treatment Recommendation*

Pertamina hendak melakukan konsolidasi aset panas Bumi dengan BUMN lainnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan menyatukan segala potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan panas bumi, Pertamina saat ini sedang melakukan konsolidasi aset panas bumi bersama dengan BUMN lain dan badan pemerintah untuk mengembangkan bisnis panas bumi."

Tujuan akhir Pertamina adalah membentuk *holding* panas Bumi yang diharapkan dapat menjadi katalis perkembangan panas Bumi di Indonesia. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Pembentukan holding panas bumi diharapkan dapat menjadi salah satu katalis untuk mewujudkan panas bumi sebagai green innovation engine di Indonesia, yang dapat berkontribusi pada pencapaian komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (NDC) serta sebagai green base load yang dapat menggantikan energi fosil."

Diyakini, pembentukan *holding* panas Bumi tersebut dapat membantu pemerintah dalam mempercepat pengembangan energi panas Bumi. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Hal ini juga dapat membantu percepatan pengembangan panas bumi dengan penambahan kapasitas terpasang dari perusahaan sebesar 1,2 GW hingga tahun 2030 dan mendukung target pencapaian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)."

i. Judul Berita: 2022, PLN Kembangkan Pembangkit Energi Baru Terbarukan 1,19 Gigawatt

Terbit: 25 November 2021

Tabel 4.19

Analisis Framing Model Robert N. Entman "2022, PLN Kembangkan Pembangkit Energi Baru Terbarukan 1,19 Gigawatt"

<i>Define Problem</i>	Masalah Manajerial berupa rencana pemerintah
-----------------------	---

	sepanjang tahun 2022.
<i>Diagnose Causes</i>	1) Adanya RUPTL 2021-2030 yang mengedepankan pengembangan energi bersih. 2) Adanya target pemerintah 2060 nol emisi karbon.
<i>Make Moral Judgement</i>	1) PLN berkomitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi agenda di RUPTL 2021-2030. 2) Indonesia memiliki banyak potensi EBT yang bisa dikembangkan menjadi sumber energi.
<i>Treatment Recommendation</i>	1) Presiden Jokowi meminta agar transisi energi segera dilakukan dan meningkatkan bauran EBT. 2) Transisi energi tidak boleh membebani negara maupun masyarakat. Proyek harus terencana dan pendanaan sudah tersedia.

1) *Define Problem*

Permasalahan utama yang ditonjolkan di dalam berita ini adalah adanya rencana pemerintah sepanjang tahun 2022. Secara garis besar, keseluruhan berita hanya menjabarkan apa yang menjadi rancangan pemerintah sepanjang tahun 2022. Rencana pemerintah dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk manajemen dan pengelolaan terhadap energi baru terbarukan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN akan mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berkapasitas hingga 1,19 gigawatt (GW) pada tahun depan. Hal tersebut dilakukan seiring dengan upaya pemerintah mempercepat transisi energi. Direktur Mega Proyek dan EBT PLN Wiluyo Kusdiharto menyatakan pengembangan beberapa proyek EBT pada tahun 2022 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2021–2030."

Tulisan di atas juga menunjukkan jika rencana tersebut sesuai dengan RUPTL PLN tahun 2021-2030. Hal tersebut semakin menunjukkan bagaimana masalah pengelolaan energi merupakan hal yang dibahas di dalam pemberitaan ini.

Selanjutnya, Tempo.co juga menuliskan jika PLN berkomitmen untuk lebih banyak lagi menggunakan energi bersih. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dalam RUPTL kami berkomitmen bahwa penggunaan energi bersih akan lebih banyak. Langkah ini kami lakukan untuk mencapai karbon netral pada 2060."

Seluruh tulisan di atas menunjukkan bagaimana PLN berusaha untuk melakukan fungsi pengelolaan energi baru terbarukan.

2) *Diagnose Causes*

RUPTL 2021-2030 yang mengedepankan penggunaan energi bersih merupakan penyebab utama mengapa PLN melakukan segala usaha untuk mengembangkan pembangkit EBT. Di dalam RUPTL tersebut, pemerintah berusaha untuk mewujudkan peralihan sumber energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN akan mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berkapasitas hingga 1,19 gigawatt (GW) pada tahun depan. Hal tersebut dilakukan seiring dengan upaya pemerintah mempercepat transisi energi. Direktur Mega Proyek dan EBT PLN Wiluyo Kusdiharto menyatakan pengembangan beberapa proyek EBT pada tahun 2022 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2021–2030."

Mau tidak mau, suka tidak suka, dan memang sudah seharusnya demikian, RUPTL 2021-2030 akan mendorong PLN untuk terus mengembangkan sumber-sumber energi baru terbarukan. Melalui RUPTL 2021-2030, maka transisi energi di Indonesia dapat mulai berjalan. Selain itu, pemerintah juga sudah mencanangkan target 2060 nol emisi karbon. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dalam RUPTL kami berkomitmen bahwa penggunaan energi bersih akan lebih banyak. Langkah ini kami lakukan untuk mencapai karbon netral pada 2060."

Kedua tulisan tersebut menunjukkan jika baik RUPTL 2021-2030 maupun target pemerintah 2060 nol emisi karbon akan mendorong PLN untuk melakukan pengembangan terhadap energi baru terbarukan.

3) *Make Moral Judgement*

Tempo.co menuliskan jika PLN akan berkomitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi isi dari RUPTL 2021-2030. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dalam RUPTL kami berkomitmen bahwa penggunaan energi bersih akan lebih banyak. Langkah ini kami lakukan untuk mencapai karbon netral pada 2060."

Komitmen PLN tersebut menunjukkan bagaimana pentingnya RUPTL 2021-2030 dalam proses transisi energi di Indonesia. Bukti nyata dari komitmen tersebut adalah proyek-proyek yang akan direalisasi pada tahun 2022. Proyek-proyek tersebut adalah sebagai berikut:

"Pada tahun depan, PLN akan mengembangkan 21 proyek EBT di antaranya proyek PLTA/M yang tersebar di Sumatera, Sulawesi dan di Jawa. Adapun kapasitas terpasang PLTA/M mencapai 490 MW, serta proyek PLTP dengan total kapasitas 195 MW."

PLN tidak hanya membuat suatu komitmen yang buta, sudah ada rencana-rencana yang disiapkan sebagai bukti dari komitmen tersebut, tinggal menunggu bagaimana realisasi dari PLN. Di sisi lain, transisi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan merupakan hal yang sangat mungkin untuk dilakukan, karena Indonesia memiliki banyak sekali potensi energi baru terbarukan. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Wiluyo menjelaskan, Indonesia sebetulnya punya potensi EBT yang besar hingga mencapai 418 GW dari surya, panas bumi, bayu, sampai arus laut. "Ini semua bisa kita manfaatkan untuk sumber energi," katanya."

4) *Treatment Recommendation*

Rekomendasi yang diberikan oleh Tempo.co di dalam berita ini adalah transisi energi segera dilakukan sembari meningkatkan bauran EBT di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan arahan presiden Joko Widodo sebagai berikut:

"Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar transisi energi segera dilakukan dengan meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi."

Tempo.co menuliskan instruksi dari presiden Jokowi untuk mensegerakan transisi energi dan meningkatkan porsi energi baru terbarukan. Selanjutnya, Tempo.co juga menuliskan jika presiden Jokowi sudah mengarahkan agar pengembangan EBT tidak membebani negara maupun masyarakat. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Jokowi juga sudah mengingatkan agar pengembangan EBT di antaranya oleh PLN tidak membebani negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta agar proyek tersebut terencana dan dipastikan tersedia pendanaannya."

Melalui arahan Jokowi tersebut, Tempo.co mengisyaratkan jika mereka menyarankan PLN dan pihak terkait untuk melakukan perencanaan yang matang serta menyiapkan penadanaan yang ada untuk pengembangan EBT di Indonesia. Dengan begitu, baik negara maupun masyarakat tidak akan dibebankan selama proses transisi energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan.

j. Judul Berita: ESDM Minta PLN Segera Bangun Pembangkit Energi Terbarukan Sesuai Jadwal

Terbit: 13 Desember 2021

Tabel 4.20

Analisis Framing Model Robert N. Entman "ESDM Minta PLN Segera Bangun Pembangkit Energi Terbarukan Sesuai Jadwal"

<i>Define Problem</i>	Masalah Manajerial berupa arahan kementerian ESDM kepada PLN untuk membangun pembangkit EBT sesuai jadwal.
<i>Diagnose Causes</i>	1) Kementerian ESDM mendorong PLN untuk

	<p>mempercepat pembangunan pembangkit EBT sesuai dengan RUPTL 2021-2030.</p> <p>2) Adanya target 23% bauran energi baru terbarukan pada tahun 2025.</p>
<i>Make Moral Judgement</i>	<p>1) Kebijakan PLN seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan penggunaan energi bersih.</p> <p>2) Kebijakan PLN dan pemerintah selaras dengan kesepakatan Paris yang disepakati oleh negara-negara G20.</p>
<i>Treatment Recommendation</i>	<p>PLN perlu lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, mempercepat proses negosiasi PPA dan keluar dengan jadwal lelang pembangkit, serta melihat pengembangan PLTS Atap sebagai peluang untuk mendukung transformasi bisnis PLN.</p>

1) *Define Problem*

Permasalahan utama yang diangkat di dalam berita oleh Tempo.co ini adalah masalah manajerial. Masalah pengelolaan energi ditunjukkan dengan adanya dorongan dari kementerian ESDM kepada PLN untuk segera merealisasikan apa yang menjadi rancangan mereka dalam RUPTL 2021-2030. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN segera melakukan pengadaan pembangkit energi baru terbarukan. Hal ini perlu segera dilakukan agar bisa memenuhi jadwal operasi sesuai yang direncanakan sebelumnya."

Tulisan lain yang menunjukkan jika ada dorongan dari kementerian ESDM kepada PLN adalah sebagai berikut:

"Ia mendorong percepatan pengembangan energi baru terbarukan sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN tahun 2021"

- 2030. Rencana pengembangan pembangkit EBT itu, kata dia, baik secara lokasi maupun kapasitas telah ditetapkan dalam RUPTL. "Jadi PLN perlu segera melakukan pengadaan agar penyelesaian COD (commercial operation date) bisa tetap sesuai (rencana)," ucapnya, Ahad pekan lalu, 12 Desember 2021."

Kedua tulisan di atas menunjukkan bagaimana berita ini berisikan masalah pengelolaan energi baru terbarukan yang melibatkan dua pihak pemerintahan sebagai aktor utama yaitu kementerian ESDM dan PLN.

2) *Diagnose Causes*

Adanya tulisan yang mengatakan kementerian ESDM mendorong PLN untuk mempercepat pembangunan pembangkit EBT sesuai dengan RUPTL 2021-2030 merupakan faktor utama yang menyebabkan munculnya masalah manajemen di dalam berita ini. RUPTL 2021-2030 sudah terbentuk dan sudah final, itulah mengapa kementerian ESDM mendorong PLN untuk segera merealisasikan pembangunan pembangkit EBT. Tujuannya agar PLN dapat melaksanakan amanat yang tertuang di dalam RUPTL 2021-2030 dengan tepat waktu. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Rencana pengembangan pembangkit EBT itu, kata dia, baik secara lokasi maupun kapasitas telah ditetapkan dalam RUPTL. "Jadi PLN perlu segera melakukan pengadaan agar penyelesaian COD (commercial operation date) bisa tetap sesuai (rencana)," ucapnya, Ahad pekan lalu, 12 Desember 2021. Dalam salinan RUPTL diketahui bahwa PLN telah menetapkan pengembangan pembangkit energi terbarukan sebesar 20.923 megawatt (MW) hingga 2030. Jumlah ini setara 51,6 persen dari total pembangkit yang direncanakan.."

Adanya target 23% bauran energi baru terbarukan pada tahun 2025 juga merupakan salah satu alasan mengapa kementerian ESDM terus berusaha untuk mendorong PLN agar segera merealisasikan pembangkit EBT. Jika pembangunan pembangkit EBT dapat terlaksana tepat waktu, maka target pemerintah bauran energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025 dapat tercapai. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dalam jangka pendek berdasarkan rencana umum energi nasional (RUEN), pemerintah menggenjot tingkat bauran energi bersih menyentuh 23 persen dari total ketersediaan energi pada 2025. Dalam

realisasinya, bauran EBT baru sebesar 11 persen. Kementerian ESDM mencatat penambahan kapasitas pembangkit EBT telah mencapai 376,04 MW hingga kuartal III tahun ini. Adapun, target bauran energi bersih hingga akhir tahun ini mencapai 875,78 MW. Sementara itu, pada tahun depan, perusahaan setrum telah membidik penambahan kapasitas listrik 648 MW.”

Tulisan di atas juga menunjukkan bagaimana masih ada target bauran energi bersih yang harus dicapai hingga akhir tahun 2021. Tidak heran pemerintah melalui kementerian ESDM terus mendorong PLN untuk menyelesaikan program mereka hingga tuntas.

3) Make Moral Judgement

Kebijakan PLN yang ditulis oleh Tempo.co dibingkai sebagai kebijakan yang selaras dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia ingin mengalihkan penggunaan energi fosil menuju energi baru terbarukan. PLN sebagai BUMN mengerti hal tersebut dan membuat kebijakan serta langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah. Itulah mengapa Tempo.co membingkai jika kebijakan dan langkah yang diambil oleh PLN sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Direktur Energi Primer PLN, Rudy Hendra Prastowo, menjelaskan kebijakan PLN seiring dengan upaya pemerintah menekan emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi bersih di dalam negeri.”

Bentuk nyata dari klaim tersebut adalah komitmen PLN untuk terus melaksanakan apa yang sudah tertuang di dalam RUPTL 2021-2030. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

“PLN berkomitmen menjalankan program sesuai RUPTL 2021 - 2030.”

Selanjutnya, apa yang telah dilakukan oleh PLN dan juga pemerintah Indonesia dibingkai sebagai suatu tindakan yang mematuhi perjanjian Paris. Perjanjian Paris adalah perjanjian yang disetujui oleh negara-negara anggota G20

yang di dalamnya juga membahas tentang perubahan iklim. Tulisan yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Hal ini juga telah disepakati bersama oleh negara G20 dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement)."

4) **Treatment Recommendation**

Dalam satu kesatuan paragraf, Tempo.co menuliskan beberapa saran penting yang perlu dilakukan oleh PLN sehingga perkembangan EBT di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

"PLN perlu lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, mempercepat proses negosiasi PPA dan keluar dengan jadwal lelang pembangkit, serta melihat pengembangan PLTS Atap sebagai peluang untuk mendukung transformasi bisnis PLN."

Pertama, Tempo.co menyarankan agar PLN lebih terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai pihak. Hal tersebut mengisyaratkan jika Tempo.co menganggap jika ada semakin banyak pihak yang terlibat di dalam proyek pengembangan EBT, maka akan semakin pengembangan EBT dapat berjalan dengan lebih cepat.

Kedua adalah mempercepat proses negosiasi PPA. Ketiga, dengan proses negosiasi PPA yang dipercepat, maka jadwal lelang pembangkit dapat segera muncul. Baru terakhir, yang keempat, Tempo.co menuliskan jika pengembangan PLTS atap merupakan salah satu solusi untuk pengembangan pembangkit EBT di Indonesia. Pengembangan PLTS atap juga bisa menjadi salah satu peluang yang mendukung transformasi bisnis PLN.

D. Pembahasan

1. Gambaran umum *framing* isu energi terbarukan di Kompas.com maupun di Tempo.co

a. Define Problem

Secara umum, permasalahan yang muncul di kedua media tersebut adalah permasalahan manajerial oleh pemerintah maupun instansi di bawah pemerintahan yang bertanggung jawab dalam perkembangan energi baru terbarukan.

Permasalahan manajerial ditunjukkan dengan banyaknya berita yang menuliskan jika pemerintah sedang berusaha untuk memaksimalkan potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Pemberitaan di Kompas.com maupun Tempo.co sama-sama banyak yang membahas tentang hal tersebut.

Berita-berita di Kompas.com yang membahas tentang permasalahan manajerial adalah berita-berita yang berjudul sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Targetkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan hingga 23 Persen pada 2025
- 2) Menteri ESDM Beberkan Tantangan Pengembangan Energi Baru Terbarukan
- 3) Pemerintah Target Porsi Energi Terbarukan Capai 48 Persen Hingga 2030
- 4) Semester I 2021, Pembangkit Energi Baru Terbarukan Bertambah 217 Megawatt
- 5) Energi Terbarukan dan Target Indonesia

Sedangkan berita-berita di Tempo.co yang membahas tentang masalah manajerial oleh pemerintah adalah berita-berita yang berjudul sebagai berikut:

- 1) Luhut Sebut Pemerintah Akan Bertahap Pensiunkan Pembangkit Listrik Batu Bara
- 2) Realisasi Bauran Energi Baru Terbarukan Capai 13,55 Persen, Naik 2,04 Persen
- 3) Dewan Energi Nasional Susun Road Map Skema Transisi Energi
- 4) Alasan ESDM Anggap Gas Alam Penting dalam Transisi Energi Fosil ke EBT
- 5) Pertamina Ingin Genjot Pemanfaatan Panas Bumi sebagai Kunci Energi Terbarukan
- 6) 2022, PLN Kembangkan Pembangkit Energi Baru Terbarukan 1,19 Gigawatt
- 7) ESDM Minta PLN Segera Bangun Pembangkit Energi Terbarukan Sesuai Jadwal

Permasalahan lain yang muncul di dalam pemberitaan isu energi terbarukan di Kompas.com adalah permasalahan ekonomi, permasalahan regulasi, masalah hukum dan juga masalah lingkungan. Permasalahan ekonomi muncul di empat berita yang terbit di Kompas.com. Permasalahan ekonomi yang muncul, mayoritas berkaitan dengan pembiayaan pengembangan sumber energi baru

terbarukan. Selain itu, beberapa permasalahan ekonomi yang muncul juga berkaitan dengan adanya dampak ekonomi yang timbul jika energi baru terbarukan bisa berkembang dengan baik. Permasalahan ekonomi yang muncul melibatkan baik masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat dan pemerintah sama-sama merasakan dampak ekonomi yang timbul. Contoh nyatanya adalah permasalahan ekonomi yang muncul di masyarakat yang meminta agar pemerintah memberikan insentif kepada mereka yang menggunakan energi baru terbarukan juga.

Sedangkan di Tempo.co, permasalahan lain yang muncul dan dibahas di dalam pemberitaan mereka adalah masalah ekonomi dan masalah lingkungan. Masalah ekonomi yang muncul, sebagian besar di dalam lingkup ekonomi makro, di mana pemerintah adalah pihak yang paling terdampak dari masalah ekonomi yang ada. Hal tersebut terjadi karena di dalam pemberitaan oleh Tempo.co, sebagian besar permasalahan ekonomi yang muncul berkaitan dengan dukungan pemerintah terhadap pengembangan energi baru terbarukan, permasalahan impor energi dan juga perubahan tarif dasar listrik. Sekalipun masyarakat terdampak secara tidak langsung, akan tetapi pihak yang paling menerima dampak adalah pemerintah.

b. Diagnose causes

Kompas.com maupun Tempo.co sama-sama menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam pengembangan energi baru terbarukan. Perbedaannya adalah, Kompas.com cenderung melihat pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas lambatnya perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia, sedangkan Tempo.co melihat pemerintah sebagai pihak yang menginisiasi perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Beberapa *diagnose causes* yang muncul di Kompas.com adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan bauran EBT masih jauh dari target.
- 2) Belum ada payung hukum yang kuat terkait dengan pengembangan EBT di Indonesia.

- 3) Kebijakan pemerintah belum mengakomodir kebutuhan untuk pengembangan energi baru terbarukan.
- 4) Adanya penetapan target yang tidak konsisten oleh pemerintah.
- 5) Kurangnya insentif pemerintah terhadap pengembangan energi baru terbarukan.
- 6) Regulasi yang masih mengacu pada pemanfaatan energi fosil.

Hasil temuan dalam analisa peneliti seperti apa yang dituliskan di atas menunjukkan jika Kompas.com membingkai pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas lambatnya perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Sedangkan temuan peneliti di Tempo.co, menunjukkan hasil yang berbeda. Sekalipun perkembangan EBT di Indonesia belum maksimal, tetapi pemerintah adalah pihak yang menginisiasi perkembangan EBT di Indonesia. Temuan tersebut didasari dari hasil analisa sebagai berikut:

- 1) EBT akan membantu mengurangi emisi karbon.
- 2) EBT akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dan LPG.
- 3) Pemerintah akan menutup pembangkit listrik batu bara dan fokus mengembangkan energi baru terbarukan.
- 4) Energi baru terbarukan lebih ekonomis.
- 5) Dewan Energi Nasional sedang menyusun peta jalan energi untuk mengikuti tren global pengurangan energi fosil dan peningkatan pemanfaatan EBT.
- 6) Adanya RUPTL 2021-2030 yang mengedepankan pengembangan energi bersih.
- 7) Adanya target pemerintah 2060 nol emisi karbon.

Keseluruhan bukti tersebut menunjukkan bagaimana Tempo.co melihat pemerintah sebagai pihak yang menginisiasi perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Kompas.com membingkai pemerintah Indonesia adalah pihak yang bertanggung jawab atas lambatnya pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Sedangkan Tempo.co membingkai jika pemerintah adalah pihak yang menginisiasi transisi energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan.

c. Make moral judgement

Pemberian nilai moral oleh Kompas.com banyak memberikan penilaian yang negatif. Bentuk penilaian negatif tersebut terwujud dari kata-kata seperti “Potensi energi baru terbarukan di Indonesia sebenarnya sangat besar, hanya saja pemanfaatannya masih sedikit.” Kompas.com melihat banyaknya potensi energi baru terbarukan di Indonesia sebagai suatu ironi dan permasalahan yang harus diatasi. Hasil analisis yang menunjukkan klaim di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia sangat besar, namun regulasi dan insentif dari pemerintah masih berfokus kepada pemanfaatan energi fosil.
- 2) Penambahan pembangkit listrik tenaga EBT selama semester 1 2021 masih kurang untuk dapat mencapai target 2025.
- 3) Kebijakan pemerintah belum berpihak kepada energi baru terbarukan.
- 4) Cadangan energi di Indonesia berlimpah, namun mayoritas bukan dari energi baru terbarukan.
- 5) Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar, tapi sedikit dimanfaatkan.
- 6) Potensi EBT di Indonesia sangat besar, namun pemanfaatannya masih jauh dari target.

Penemuan hasil dari analisis peneliti seperti di atas menunjukkan bagaimana Kompas.com menyayangkan kurang maksimalnya pemanfaatan EBT oleh pemerintah Indonesia.

Sebetulnya ada penilaian moral lain yang netral seperti “pemerintah optimis akan mencapai target bauran energi tahun 2025”, “harga listrik bisa menjadi lebih murah jika beralih ke EBT” dan “RUPTL 2021-2030 adalah RUPTL yang lebih hijau serta sesuai dengan target pemerintah”. Namun secara garis besar, Kompas.com menyayangkan capaian bauran EBT Indonesia yang masih jauh dari target.

Berbeda dengan Kompas.com, Tempo.co melihat jika langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah merupakan hal yang positif. Pemerintah datang untuk membawa perubahan bagi Indonesia. Melalui pemerintah, Indonesia dapat melakukan transisi energi, dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Sekalipun apa yang dilakukan belum maksimal, akan tetapi, langkah-langkah

yang dilakukan sudah merupakan suatu hal yang patut diapresiasi.

Hasil temuan peneliti yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) EBT akan membantu mengurangi emisi karbon.
- 2) EBT akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dan LPG.
- 3) Kenaikan dalam waktu 4 bulan adalah hal yang bagus.
- 4) Pemerintah berkomitmen untuk mengganti pembangkit fosil dengan pembangkit EBT dalam rentang tahun 2025-2045.
- 5) Peralihan energi fosil menuju EBT tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan aspek ketersediaan energi.
- 6) PLN berkomitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi agenda di RUPTL 2021-2030.

Tempo.co membingkai pemerintah sebagai sosok yang akan melaksanakan komitmen mereka dalam pengembangan energi baru terbarukan. Selain itu, Tempo.co melihat jika pemerintah tidak sembarangan dalam mengembangkan energi baru terbarukan, karena pemerintah juga memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan jika Kompas.com membingkai pemerintah secara negatif, karena pemerintah gagal memaksimalkan potensi energi baru terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia. Sedangkan Tempo.co melihat pemerintah secara positif, karena pemerintah sudah berupaya untuk melakukan pengembangan dalam energi baru terbarukan di Indonesia, jika dan hasil-hasil dari pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia akan memberi dampak positif bagi negara maupun masyarakat.

d. Treatment Recommendation

Kompas.com maupun Tempo.co sama-sama memberikan rekomendasi yang bersifat teknis. Rekomendasi-rekomendasi solusi yang ditawarkan semuanya seputar langkah-langkah apa yang harus ditempuh agar perkembangan energi baru terbarukan dapat berjalan dengan baik di Indonesia.

Hasil analisa dari Kompas.com yang menunjukkan hal tersebut adalah

sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan riset dan inovasi dalam industri energi.
- 2) Mengganti energi fosil dengan energi terbarukan yang tersedia secara lokal.
- 3) Menyusun strategi untuk meningkatkan porsi Energi Baru Terbarukan.
- 4) Mengantisipasi dan menjaga agar investor tetap mau masuk ke Indonesia.
- 5) Mendorong pemanfaatan dan pengembangan energi baru terbarukan.
- 6) Memperbaiki regulasi-regulasi yang masih mengacu kepada pemanfaatan energi fosil.
- 7) Memberikan insentif seperti pemerintah memberi insentif untuk pelanggan PLN.
- 8) Menghentikan rencana pembangunan PLTU.
- 9) Membuat peta jalan untuk peralihan dari energi fosil menuju energi baru terbarukan.
- 10) Melakukan moratorium terhadap PLTU mulai dari sekarang.
- 11) Menyusun program dan regulasi untuk mengurangi penggunaan energi fosil secara natural.
- 12) Mengesahkan Perpres yang mengatur harga listrik dari pembangkit listrik energi baru terbarukan.
- 13) Membuat regulasi untuk mengurangi resiko investasi serta mempermudah proses pendanaan proyek EBT.
- 14) Melakukan penyesuaian pembangunan pembangkit listrik, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 15) Menyusun tarif ekspor impor listrik.
- 16) Kerja empat sampai lima kali lipat dari sekarang sehingga target 2025 dapat tercapai.
- 17) Merampungkan rencana RUPTL 2021-2030.
- 18) Membuat target yang konsisten.
- 19) Mengedepankan kebijakan yang nyata untuk pengembangan energi baru terbarukan.
- 20) Membuat payung hukum pengembangan EBT.
- 21) Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan EBT.

Seluruh saran yang dituliskan di atas merupakan saran yang bersifat teknis dan tujuannya adalah agar energi baru terbarukan dapat berkembang dengan lebih pesat di Indonesia.

Tempo.co juga menuliskan saran-saran yang kurang lebih sama-sama bersifat teknis dan untuk perkembangan energi baru terbarukan juga. Hasil analisa peneliti yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengganti secara bertahap energi impor dengan energi baru terbarukan yang tersedia secara lokal.
- 2) Meningkatkan pemanfaatan PLTS.
- 3) Memanfaatkan momentum pandemi untuk mengembangkan ekonomi hijau.
- 4) Secara bertahap menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga batu bara.
- 5) Membangun proyek kawasan industri hijau terintegrasi.
- 6) Pembangunan PLTS sebagai prioritas utama pengembangan EBT.
- 7) Pemerintah menyiapkan strategi dengan menempatkan PLTS sebagai tulang punggung EBT nasional.
- 8) Mensegerakan proses peralihan dari energi fosil menuju energi baru terbarukan.
- 9) Pemerintah hendak menghentikan PLTU dalam rentang tahun 2025-2045.
- 10) Segera mengganti pembangkit fosil dengan pembangkit EBT.
- 11) Meningkatkan pembangunan infrastruktur gas untuk menunjang produksi dan pendistribusian gas alam.
- 12) Membentuk perusahaan *holding* panas Bumi di Indonesia.
- 13) Presiden Jokowi meminta agar transisi energi segera dilakukan dan meningkatkan bauran EBT.
- 14) Transisi energi tidak boleh membebani negara maupun masyarakat. Proyek harus terencana dan pendanaan sudah tersedia.
- 15) PLN perlu lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, mempercepat proses negosiasi PPA dan keluar dengan jadwal lelang pembangkit, serta melihat pengembangan PLTS Atap sebagai peluang untuk mendukung transformasi bisnis PLN.

Hasil analisa terhadap media Tempo.co menghasilkan rekomendasi penyelesaian yang tidak jauh berbeda dari Kompas.com. Secara garis besar, baik

Kompas.com dan Tempo.co sama-sama menyarankan agar:

- 1) Pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia dipercepat.
- 2) Pembuatan regulasi yang sesuai dan mengacu kepada pengembangan energi baru terbarukan.
- 3) Pembuatan infrastruktur yang memadai sehingga EBT dapat berkembang secara maksimal.
- 4) Pemerintah membantu pihak-pihak pengembang EBT dalam segi finansial, baik pemberian insentif secara langsung maupun regulasi yang mempermudah adanya investor untuk pengembangan energi baru terbarukan.

2. Perbandingan *framing* antara media Kompas.com dengan Tempo.co

Dari penjelasan di atas, dapat kita temukan jika Kompas.com dan Tempo.co membingkai isu energi baru terbarukan dalam sudut pandang yang berbeda. Sekalipun permasalahan yang muncul mayoritas merupakan masalah manajemen dan pengelolaan, akan tetapi, permasalahan yang dimunculkan oleh Kompas.com adalah permasalahan yang lebih kompleks. Kompas.com juga membingkai isu energi baru terbarukan ini sebagai masalah ekonomi, masalah regulasi, masalah manajemen, masalah hukum dan masalah lingkungan. Sedangkan Tempo.co hanya membingkai isu energi baru terbarukan sebagai masalah manajemen, masalah ekonomi dan masalah lingkungan.

Selanjutnya, kembali lagi, aktor utama penyebab dari timbulnya permasalahan adalah pemerintah dan instansi terkait yang berada di bawah pemerintahan. Kompas.com melihat pemerintah sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas kurang maksimalnya pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Sedangkan Tempo.co melihat jika pemerintah adalah aktor utama yang mendorong adanya transisi energi di Indonesia.

Dalam hal pemberian penilaian moral, Kompas.com menilai pemerintah sebagai sosok yang negatif, menghambat perkembangan EBT dan kurang peduli terhadap perkembangan EBT di Indonesia. Sedangkan Tempo.co menilai pemerintah sebagai sosok yang positif, memperhatikan masyarakat dalam mengembangkan EBT dan juga mencari jalan keluar terbaik agar pengembangan

EBT dapat berjalan secara maksimal. Pembedaan antara Kompas.com dan Tempo.co sangatlah berbeda.

Rekomendasi yang diberikan baik oleh Kompas.com maupun Tempo.co adalah saran teknis agar transisi energi baru terbarukan dapat berjalan dengan baik di Indonesia. Jika disimpulkan, saran-saran yang diberikan oleh kedua media tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia dipercepat.
- 2) Pembuatan regulasi yang sesuai dan mengacu kepada pengembangan energi baru terbarukan.
- 3) Pembuatan infrastruktur yang memadai sehingga EBT dapat berkembang secara maksimal.
- 4) Pemerintah membantu pihak-pihak pengembang EBT dalam segi finansial, baik pemberian insentif secara langsung maupun regulasi yang mempermudah adanya investor untuk pengembangan energi baru terbarukan.

Tabel 4.21

Perbandingan *framing* isu energi baru terbarukan di Kompas.com dan Tempo.co

	Kompas.com	Tempo.co
<i>Define Problem</i>	<p>1) Masalah manajemen yang kurang baik oleh pemerintah.</p> <p>2) Masalah ekonomi terkhusus dalam hal pembiayaan dan dukungan terhadap proyek energi baru terbarukan yang kurang maksimal oleh pemerintah.</p> <p>3) Masalah regulasi yang dinilai masih mengacu kepada pemanfaatan energi fosil.</p>	<p>1) Masalah manajemen, di mana pemerintah mendukung adanya pembenahan manajemen energi agar perkembangan EBT di Indonesia dapat berjalan lebih cepat.</p> <p>2) Masalah ekonomi berkaitan dengan usaha pemerintah untuk menyiapkan dana dan investasi yang cukup</p>

	<p>4) Masalah lingkungan yang timbul akibat dari lambatnya pengerjaan proyek energi baru terbarukan.</p> <p>5) Masalah hukum yang dianggap masih kurang jelas dalam mengatur soal pengembangan energi baru terbarukan.</p>	<p>sehingga proyek EBT dapat berjalan lebih maksimal.</p> <p>3) Masalah lingkungan yang harus segera dituntaskan dengan mempercepat proyek pengembangan EBT.</p>
<i>Diagnose causes</i>	Pemerintah bertanggung jawab atas terhambatnya perkembangan EBT di Indonesia.	Pemerintah inisiator dari perkembangan EBT di Indonesia.
<i>Make moral judgement</i>	<p>1) Pemerintah menghambat perkembangan EBT.</p> <p>2) Pemerintah tidak peduli terhadap perkembangan EBT.</p> <p>3) Regulasi dan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak memihak kepada perkembangan EBT.</p>	<p>1) Pemerintah adalah aktor utama dari pertumbuhan EBT.</p> <p>2) Dalam mengembangkan EBT, pemerintah peduli terhadap rakyat dan mencari jalan tengah terbaik.</p> <p>3) Pemerintah sedang mengusahakan yang terbaik untuk mengembangkan EBT.</p>
<i>Treatment Recommendation</i>	<p>1) Akselerasi pengembangan EBT.</p> <p>2) Penyesuaian regulasi.</p> <p>3) Pembangunan infrastruktur.</p> <p>4) Pemberian insentif.</p>	<p>1) Akselerasi pengembangan EBT.</p> <p>2) Penyesuaian regulasi.</p> <p>3) Pembangunan infrastruktur.</p> <p>Pemberian insentif.</p>